



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pilar perencanaan pembangunan kependudukan yang terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa perkembangan kependudukan perlu dikelola dengan terencana, baik kuantitas, kualitas, maupun mobilitasnya secara berdaya guna dan berhasil guna dan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat juga mempunyai peran yang penting dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar terarah, efektif, terukur guna mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar, maka perlu menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan Keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan Administrasi Kependudukan.
6. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan Penduduk setempat.
7. Penduduk adalah warga Daerah dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
8. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Daerah untuk mewujudkan target Pembangunan Kependudukan.
9. Kuantitas Penduduk adalah jumlah Penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah Penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
10. Kualitas Penduduk adalah kondisi Penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak.

11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
14. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran Penduduk secara keruangan.
15. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata Persebaran Penduduk agar serasi dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
16. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan Penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
17. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan Penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
20. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana.
21. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan Kependudukan dengan Daya Dukung Alam dan Daya Tampung Lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.
22. Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
23. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan Penduduk.
24. Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok Penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan GDPK Daerah tahun 2025-2045 yakni untuk memberikan pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan agar efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan GDPK Daerah Tahun 2025-2045 yakni:

- a. mewujudkan pengendalian Kuantitas Penduduk agar tumbuh secara seimbang dan sesuai dengan Daya Dukung Alam serta Daya Tampung Lingkungan hidup;
- b. mewujudkan Kualitas Penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah;
- c. mewujudkan Keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
- d. mewujudkan mobilitas Persebaran Penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan
- e. mewujudkan administrasi dan database Kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.

BAB II GDPK

Pasal 4

- (1) GDPK Daerah tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi analisis situasi Kependudukan dan capaian Pembangunan Kependudukan;
 - c. bab III berisi proyeksi Penduduk dan kondisi ideal Kependudukan;
 - d. bab IV berisi visi, misi, isu strategis;
 - e. bab V berisi kebijakan dan strategi Pembangunan Kependudukan;
 - f. bab VI berisi peta jalan (*roadmap*) Pembangunan Kependudukan; dan
 - g. bab VII berisi penutup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistematika GDPK Daerah tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TIM KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan GDPK Daerah tahun 2025-2045, Bupati dapat membentuk tim koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK Daerah tahun 2025-2045.

- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan keluarga berencana;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi masyarakat dan desa;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian;
 - k. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
 - l. Perangkat Daerah yang membidangi statistik; dan
 - m. unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan GDPK Daerah tahun 2025-2045 dilaksanakan oleh tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan GDPK Daerah tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (3) Tim koordinasi pelaksanaan GDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi GDPK Daerah tahun 2025-2045 kepada Bupati.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 29 Tahun 2016 tentang *Grand Design* Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun

2010-2035 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025-2045



PEMERINTAH
KABUPATEN KARANGANYAR

GRAND DESAIN PEMBANGUNAN PENDUDUK (GDPK) KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2045



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPERLITBANG)**

Komplek Perkantoran Cangkan Telp/Fax. (0271) 495179
Email: baperlitbangkaranganyar@gmail.com

Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 dapat diselesaikan. Penyusunan dokumen perencanaan ini berdasarkan pada Perpres Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan dengan pendekatan lima (5) pilar pembangunan kependudukan yaitu pengelolaan kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, pembangunan keluarga berkualitas dan data dan informasi dan penataan kependudukan.

Arahan kebijakan dalam GDPK berdasarkan pada arahan kebijakan Pusat, Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2045 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berdasar lima pilar pembangunan kependudukan dan keluarga sejahtera dengan memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penyusunan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada segenap perangkat daerah Kabupaten Karanganyar yang telah menyediakan data dan informasi serta pembahasan rancangan ini. Semoga hasil penyusunan ini bermanfaat bagi perencanaan pembangunan daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-7
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.4. Ruang Lingkup	I-8
1.5. Dasar Pemikiran	I-9
 BAB II ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.....	 II-1
2.1. Kondisi Geografis	II-1
2.2. Kuantitas Penduduk	II-2
2.3. Kualitas Penduduk	II-9
2.4. Pembangunan Keluarga	II-24
2.5. Persebaran dan Mobilitas Penduduk	II-29
2.6. Data dan Informasi dan Penataan Kependudukan	II-32
 BAB III PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN	 III-1
3.1. Kuantitas Penduduk	III-1
3.2. Kualitas Penduduk.....	III-14
3.3. Persebaran dan Mobilitas Penduduk	III-18
3.4. Pembangunan Keluarga	III-20
3.5. Data dan Informasi dan Penataan Kependudukan	III-22
 BAB IV VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS	 IV-1
4.1. Visi dan Misi GDPK Provinsi Jawa Tengah	IV-1
4.2. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Karanganyar	IV-2
4.3. Visi dan Misi GDPK Kabupaten Karanganyar	IV-3
4.4. Tujuan Pembangunan GDPK	IV-5
4.5. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan	IV-5
 BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KARANGANYAR	 V-1
5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	V-1
5.2. Penguatan Kualitas Penduduk	V-3
5.3. Pembangunan Keluarga	V-4
5.4. Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	V-4
5.5. Penataan Administrasi Kependudukan dan Layanan Berbasis Teknologi Informatika (TI)	V-5

BAB VI	PETA JALAN (ROADMAP) PEMBANGUNAN	
	KEPENDUDUKAN.....	VI-1
6.1.	Pengendalian Kuantitas Penduduk.....	VI-1
6.2.	Peningkatan Kualitas Penduduk	VI-5
6.3.	Pembangunan Keluarga	VI-9
6.4.	Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	VI-13
6.5.	Pembangunan Data dan Informasi	
	Kependudukan	VI-17
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Arahan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Dalam GDPK	I-11
Tabel 2.1.	Wilayah Administratif Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT, RW dan Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar	II-2
Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio Tahun 2019-2023	II-3
Tabel 2.3.	Persebaran Penduduk Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Wilayah Kecamatan Tahun 2019-2023	II-4
Tabel 2.4.	Usia Harapan Hidup (UHH), Kasus Kematian Ibu, dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	II-14
Tabel 2.5.	Kondisi Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	II-15
Tabel 2.6.	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	II-16
Tabel 2.7.	PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023	II-17
Tabel 2.8.	Persebaran Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2023	II-29
Tabel 2.9.	Persentase Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar	II-30
Tabel 2.10.	Angka Migrasi Neto Per Kecamatan	II-32
Tabel 2.11.	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	II-34
Tabel 2.12.	Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	II-34
Tabel 3.1.	Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045	III-3
Tabel 3.2.	Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045 (Jiwa)	III-5
Tabel 3.3.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045...	III-7
Tabel 3.4.	Perkiraan <i>Total Fertility Rate</i> (TFR) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045	III-10
Tabel 3.5.	Proyeksi <i>Infant Mortality Rate</i> (IMR) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045	III-12
Tabel 3.6.	Indikator Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Persen)	III-13
Tabel 3.7.	Indikator Pendidikan Penduduk Kabupaten Karanganyar yang Diinginkan Pada Tahun 2045 ...	III-15
Tabel 3.8.	Indikator Penduduk Kabupaten Karanganyar yang Diinginkan pada Tahun 2045	III-17

Tabel 3.9.	Indikator Ekonomi Penduduk Kabupaten Karanganyar yang Diinginkan Pada Tahun 2045 ...	III-18
Tabel 3.10.	Indikator Kepadatan Penduduk Kabupaten Karanganyar yang Diingin Pada Tahun 2045	III-19
Tabel 3.11.	Indikator Pembangunan Keluarga di Kabupaten Karanganyar yang Diinginkan Pada Tahun 2045 ...	III-22
Tabel 3.12.	Indikator Administrasi Kependudukan Kabupaten Karanganyar yang Diinginkan Pada Tahun 2045 ...	III-23
Tabel 6.1.	Pokok-Pokok Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045	VI-3
Tabel 6.2.	Pokok-Pokok Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045	VI-5
Tabel 6.3.	Pokok-Pokok Roadmap Pembangunan Keluarga Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045	VI-7
Tabel 6.4.	Pokok-Pokok Roadmap Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045	VI-8
Tabel 6.5.	Pokok-Pokok Roadmap Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045	VI-10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	I-3
Gambar 1.2.	Alur Pemikiran GDPK Kabupaten Karanganyar	I-11
Gambar 2.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	II-5
Gambar 2.2.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	II-5
Gambar 2.3.	Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kelompok Umur Tahun 2023	II-8
Gambar 2.4.	Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	II-9
Gambar 2.5.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional 2019-2023 (Tahun)	II-10
Gambar 2.6.	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2023 (Tahun)	II-10
Gambar 2.7.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)	II-11
Gambar 2.8.	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga 2023 (Tahun)	II-12
Gambar 2.9.	Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	II-18
Gambar 2.10.	Persentase TPT Kab. Karanganyar Tahun 2019-2023	II-19
Gambar 2.11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Karanganyar Tahun 2019-2023	II-20
Gambar 2.12.	TPAK Perempuan Kab. Karanganyar Tahun 2019-2023	II-21
Gambar 2.13.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	II-22
Gambar 2.14.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023	II-23
Gambar 2.15.	Pengeluaran per Kapita Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2019-2023 (Ribu Rupiah)	II-23
Gambar 2.16.	Perkembangan IKG Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023	II-24
Gambar 2.17.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2023	II-25
Gambar 3.1.	Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045	III-9

Gambar 6.1.	Pokok-Pokok Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045	VI-3
Gambar 6.2.	Pokok-Pokok Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.....	VI-7
Gambar 6.3.	Pokok-Pokok Roadmap Pembangunan Keluarga Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045	VI-10
Gambar 6.4.	Pokok-Pokok Roadmap Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045	VI-14
Gambar 6.5.	Pokok-Pokok Roadmap Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045	VI-18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan manusia dan seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Perumusan tujuan pembangunan jangka panjang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 yaitu mewujudkan Generasi Emas 2045: Negara Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Upaya mewujudkan Generasi Emas 2045 adalah pembangunan sumber daya manusia berkualitas, ketahanan keluarga dan. Tujuan utama pembangunan nasional adalah pembangunan manusia dan masyarakat Indonesia sebagai kunci mencapai bangsa dan negara maju setara dengan negara maju lainnya.

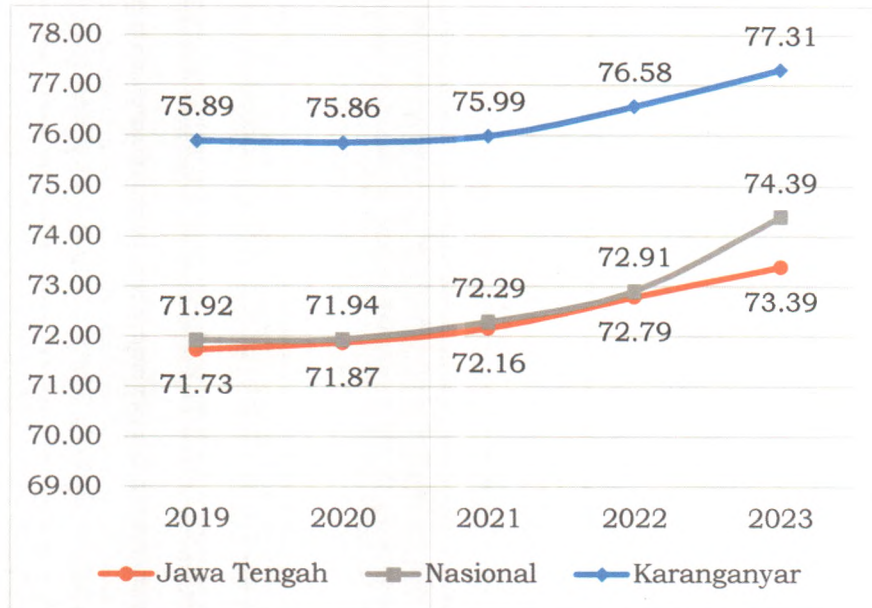
Kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). Arah kebijakan pembangunan kependudukan bersifat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan diarahkan pemanfaatan secara optimal “bonus demografi” berdasarkan lima (5) pilar kependudukan yaitu : (1) kuantitas penduduk terkait dengan jumlah, struktur/komposisi, pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk; (2) kualitas penduduk dan pembangunan keluarga dengan mewujudkan ketahanan dan kesejahteraan; (3) persebaran penduduk bagi keseimbangan sumber daya; (4) penataan persebaran dan mobilitas penduduk; dan (5) pengaturan sistem administrasi kependudukan yang akurat dan valid sehingga bermanfaat bagi penyelenggaraan bidang pembangunan lainnya.

Berdasarkan UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dinyatakan bahwa pembangunan kependudukan di daerah menjadi bagian integral dari kebijakan nasional dan bersifat sinergis.

Gambaran capaian pembangunan kependudukan Kabupaten Karanganyar berdasarkan lima pilar tahun 2019–2023 dikemukakan sebagai berikut :

1. Gambaran kuantitas penduduk Kabupaten Karanganyar dari tahun 2019-2023, menunjukkan pertumbuhan positif yaitu tahun 2019 sebanyak 886.519 jiwa, meningkat menjadi sebanyak 955.116 jiwa pada tahun 2023, terdiri dari laki-laki sebanyak 476.253 jiwa dan perempuan lebih banyak yaitu 478.863 jiwa dan terus tumbuh secara positif. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Karanganyar menunjukkan angka 99,45 pada tahun 2023, atau dinyatakan banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang perempuan terdapat 99 orang laki-laki. Sedangkan berdasarkan kelompok umur dikategorikan : (1) belum produktif (<15 tahun) diketahui sebanyak 205.068 jiwa (21,47%), (2) kelompok usia produktif (15–64 tahun) sebanyak 655.369 jiwa (68,62%) merupakan jumlah terbesar dan (3) kelompok umur tidak produktif sebanyak 94,679 jiwa (9,91%) dengan angka ketergantungan sebesar 45,74 yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk produktif menanggung beban 45 orang penduduk tidak produktif. Dengan demikian Kabupaten Karanganyar telah memasuki bonus demografi yang strategis bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan masyarakat industri.
2. Capaian kinerja peningkatan kualitas penduduk berdasarkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan perkembangan menggembirakan dari sebesar 75,89 tahun 2019 meningkat menjadi 77,31 pada tahun 2023. Nilai IPM Kabupaten

Karanganyar sebesar 77,31 (kategori tinggi), kondisi IPM tersebut lebih tinggi daripada IPM Provinsi Jawa Tengah (2023) sebesar 73,39 dan nasional sebesar 74,39. Perbandingan IPM tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :



Sumber : BPS Kab. Karanganyar, 2024

Gambar 1.1.
Perkembangan IPM Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019-2023

Tantangan dalam peningkatan indeks pembangunan manusia terkait dengan kualitas kesehatan, pendidikan yang relatif rendah, kualitas tenaga kerja usia produktif, pengangguran dan penduduk miskin masih cukup tinggi.

3. Gambaran tentang persebaran penduduk berdasarkan wilayah kecamatan diketahui Kecamatan Gondangrejo memiliki penduduk terbesar (2023) yaitu 90.296 jiwa (9,45%) dan terkecil adalah Kecamatan Jenawi sebanyak 27.735 jiwa. Persebaran penduduk kurang merata. Kecamatan dengan penduduk besar terdapat di perkotaan dan pusat-pusat perekonomian daerah. Rata-rata kepadatan penduduk tahun 2023 sebesar 1.244 jiwa per kilometer persegi, hal ini termasuk kategori belum padat.
4. Capaian pembangunan ketahanan keluarga diketahui dengan jumlah penduduk sebanyak 955.116 jiwa, dengan jumlah

keluarga sebanyak 212.248 keluarga dengan rata-rata jumlah anggota keluarga 4-5 jiwa, termasuk keluarga kecil.

5. Capaian kinerja pelayanan administrasi kependudukan sebagai bentuk layanan kependudukan dan pencatatan sipil universal (statistik kependudukan sepanjang hayat), tahun 2024 sebagai Dekade Pencatatan Sipil Universal dari kartu keluarga, akta kelahiran, kartu tanda penduduk, pencatatan perubahan, akta perkawinan dan kelengkapan lainnya secara terpadu dalam bentuk layanan Sistem Administrasi Kependudukan berbasis teknologi informatika dengan sistem Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara nasional. Pelayanan administrasi kependudukan sangat bermanfaat mendukung berbagai akses pelayanan penduduk lainnya. Pelayanan kelengkapan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai perwujudan pengakuan negara terhadap hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) agar menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) sebagai dokumen perencanaan strategis berjangka panjang yang wajib disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Arahan penyusunan GDPK Kabupaten Karanganyar memperhatikan kebijakan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2045 sejalan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan berdasarkan lima (5) pilar yaitu : (1) pengelolaan kuantitas penduduk; (2) peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga; (3) penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk; dan (4) pembangunan keluarga berkualitas dan (5) penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan.

Kabupaten Karanganyar pada tahun 2016 telah menyusun Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2035 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016, namun dalam perkembangannya dokumen tersebut perlu dilakukan peninjauan kembali, hal ini karena perubahan kebijakan dan arahan Pusat dan kebijakan Provinsi Jawa Tengah serta dinamika perubahan masyarakat Kabupaten Karanganyar. Menyesuaikan dengan perubahan revolusi industri 4.0 dan *Society* 5.0 semakin meningkatnya penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) agar pembangunan kependudukan mendukung capaian pembangunan berkelanjutan. Demikian pula dengan berlakunya Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045. Capaian kinerja GDPK Kabupaten Karanganyar dapat mendukung penyelesaian permasalahan kependudukan dan pembangunan ketahanan keluarga di Jawa Tengah dan Nasional.

Kebijakan GDPK merupakan langkah kebijakan Kabupaten Karanganyar mewujudkan pertumbuhan penduduk seimbang, mengembangkan kualitas penduduk dan keluarga menjadi fondasi dalam memperbaiki segala aspek dan dimensi pembangunan dan kehidupan masyarakat lebih maju, mandiri, dan harmoni. Keberhasilan pembangunan kependudukan dan ketahanan keluarga menjadikan negara kita akan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dengan mengintegrasikan variabel-variabel kependudukan, seperti kuantitas penduduk, persebaran, struktur umur, kualitas penduduk (pendidikan, keterampilan, kesehatan dan kesejahteraan penduduk), kemampuan dan daya dukung lingkungan hidup dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sepanjang hayat. Hal ini menjadi bagian dari perwujudan hak asasi manusia dan tata kelola kehidupan sosial yang bermartabat.

Amanat tersebut mengarahkan agar upaya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, pelaksanaan keluarga berencana dan keluarga sejahtera (KB dan KS), keluarga berkualitas memerlukan perencanaan dan pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya (termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender (IPG). Pentingnya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Indeks Pembangunan Keluarga) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bermartabat.

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional memiliki daya saing dalam dinamika revolusi industri ver 4.0 dan sistem sosial (*social system* 5.0) dengan kerjasama secara global.

Pembangunan dan ketahanan keluarga sangat strategis dalam peningkatan kualitas penduduk. Keluarga sebagai lembaga terkecil dalam masyarakat menjadi pilar utama peningkatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan Generasi Emas 2045 sebagaimana arahan Undang-Undang Nomor 56 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Keberhasilan pembangunan keluarga menjadi pilar dalam mewujudkan ketahanan keluarga, sebagaimana dinyatakan bahwa negara yang kuat dibangun dari keluarga yang berketahanan kuat dan berkualitas (BKKBN, 2018).

1.2. Dasar Hukum

Dasar peraturan perundangan penyusunan dokumen perencanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga;
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goal's*).
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2045; dan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan GDPK adalah menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait dengan perumusan arah kebijakan pembangunan kependudukan jangka panjang berdasarkan lima (5) pilar pembangunan kependudukan yaitu pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan administrasi kependudukan berdasarkan arahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045.

Sedangkan tujuan penyusunan GDPK Kabupaten Karanganyar, adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan secara deskriptif tentang capaian pembangunan kependudukan Kabupaten Karanganyar berdasarkan lima pilar tahun 2019-2023.
2. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan kependudukan yang ingin dicapai pada tahun 2025-2045.
3. Memberikan pedoman tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan kependudukan di Kabupaten Karanganyar.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan GDPK Kabupaten Karanganyar, dikemukakan sebagai berikut :

1. Identifikasi dan analisis capaian pembangunan kependudukan periode tahun 2019 - 2023;
2. Merumuskan visi dan misi pembangunan kependudukan Kabupaten Karanganyar;
3. Analisis indikator pembangunan kependudukan berdasarkan lima pilar pembangunan kependudukan di Kabupaten Karanganyar;

4. Identifikasi program prioritas dan capaian kinerja pembangunan kependudukan berdasarkan data dari perangkat daerah pengampu urusan terkait pembangunan kependudukan di Kabupaten Karanganyar;
5. Merumuskan sasaran, program prioritas dan sumber daya pendukung pembangunan kependudukan di Kabupaten Karanganyar.

1.5. Dasar Pemikiran

Dalam mencapai tujuan pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga diperlukan arahan kebijakan yang dinamakan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK). GDPK adalah dokumen perencanaan strategis jangka panjang yang wajib disusun oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah mewujudkan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan. Sedangkan **Pembangunan Berwawasan Kependudukan** adalah pendekatan pembangunan dengan mempertimbangkan dinamika dan karakteristik penduduk untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Program pembangunan menempatkan pengembangan sumber daya manusia ke dalam kebijakan dan program prioritas dengan mempertimbangkan kondisi kependudukan, pengendalian penduduk, penataan persebaran dan mobilitas penduduk dan pengaturan administrasi kependudukan. Pengaturan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pengakuan hak asasi warga negara. Pencatatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai pelayanan administrasi sepanjang hayat dan pengakuan bagi penduduk akan hak-hak dasar.

Pentingnya penyusunan GDPK sebagai perencanaan strategis dalam rangka mewujudkan kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mendasarkan pada lima (5) pilar sebagai berikut :

1. Kuantitas penduduk.
2. Kualitas penduduk dan pembangunan keluarga.

3. Persebaran penduduk.
4. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk.
5. Pengaturan administrasi kependudukan.

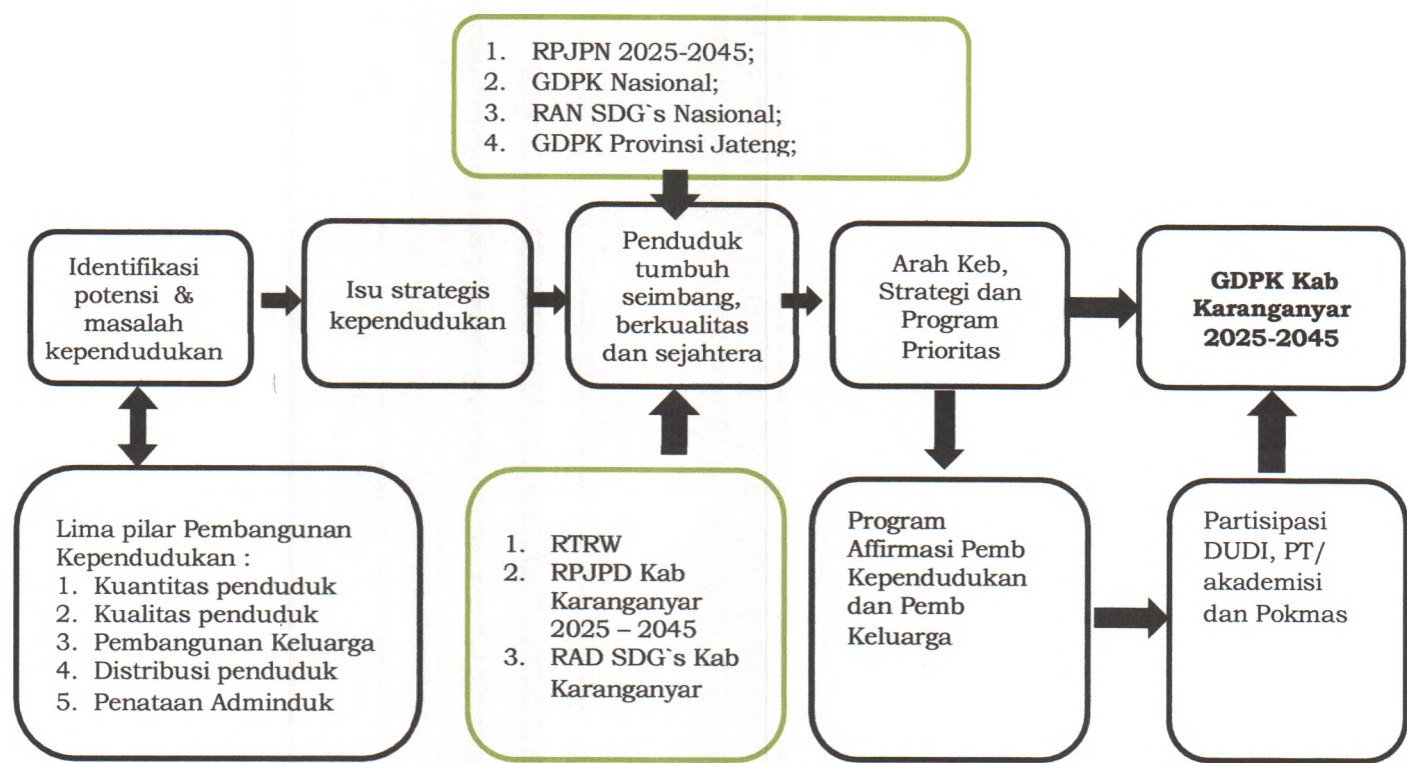
Dalam mewujudkan strategi pembangunan berwawasan kependudukan baik secara nasional maupun kebijakan di Kabupaten Karanganyar maka diperlukan pencapaian pertumbuhan penduduk yang seimbang dan pembangunan keluarga berkualitas dengan arahan kebijakan melalui upaya-upaya secara terencana melalui :

1. Pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian,
2. Pengarahan mobilitas penduduk,
3. Pengembangan kualitas penduduk dan seluruh dimensinya,
4. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga,
5. Penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh.

Berdasarkan Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) agar menyusun dokumen GDPK sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan menyediakan kerangka pikir dan panduan peta jalan (roadmap) untuk mengintegrasikan berbagai variabel pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Alur pemikiran dalam Perencanaan GDPK Kabupaten Karanganyar, dikemukakan sebagai berikut :

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)
Kabupaten Karanganyar <<<<



Gambar 1.2.
Alur Pemikiran GDPK Kabupaten Karanganyar

Dokumen perencanaan tentang GDPK Kabupaten Karanganyar bersifat terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Karanganyar agar kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dapat diwujudkan dalam pembangunan daerah, dikemukakan secara ringkas sebagai berikut :

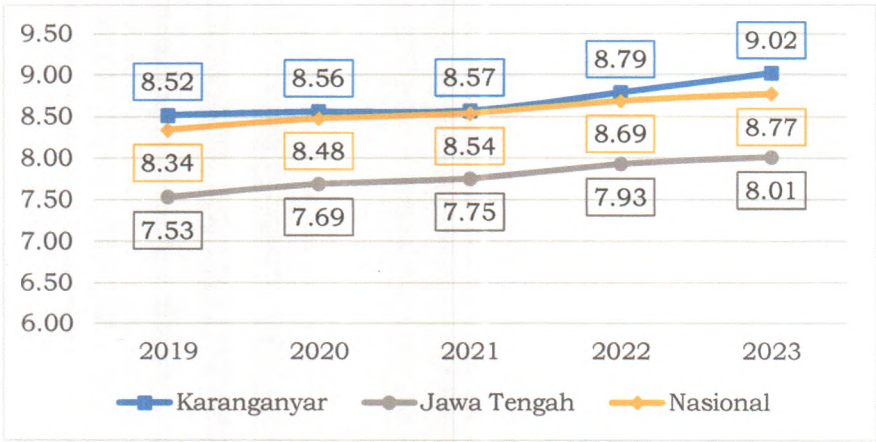
Tabel 1.1.
Arahan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Dalam GDPK

No.	Dokumen Perencanaan	Arahan Kebijakan	Keterkaitan dengan GDPK
1	Perda No. 19/2019 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar	Kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan zonasi wilayah sesuai dengan kemanfaatan, daya tampung dan daya dukungan serta kelestarian lingkungan	Penjabaran kebijakan pembangunan berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan, daya dukung dan daya tampung lingkungan alam dan sosial.

No.	Dokumen Perencanaan	Arahan Kebijakan	Keterkaitan dengan GDPK
2	Perda No. 4/2024 tentang RPJPD Kabupaten Karanganyar 2025 – 2045	Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan visi pembangunan jangka panjang Karanganyar Life Centre Nusantara, Maju, Kompetitif dan Harmoni. Penjabaran empat misi dan program prioritas berdasarkan tahapan lima tahunan.	Penjabaran kebijakan pembangunan daerah dalam mendukung tercapainya visi, misi dan program prioritas jangka panjang daerah sesuai dengan kewenangan.
3	RAD SDG`s Kabupaten Karanganyar	Kebijakan pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan, kelaparan, pendidikan untuk semua, kesetaraan gender dan kelestarian lingkungan hidup.	Penjabaran kebijakan pembangunan daerah berdasarkan lima pilar pembangunan kependudukan yang erat kaitannya dengan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s).

b. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS di Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami peningkatan, pada Tahun 2019 sebesar 8,52 menjadi 9,02 pada Tahun 2023. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, RLS Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 berada di atas angka Jawa Tengah (8,01) dan Nasional (8,77). Selengkapnya terkait perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

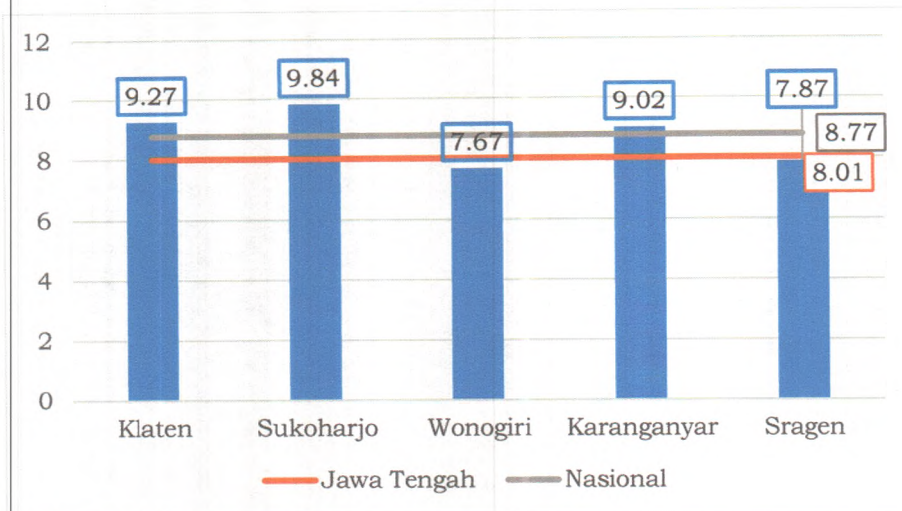


Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar 2024

Gambar 2.7.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar, Provisi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya, capaiannya masih di bawah Kabupaten Klaten sebesar 9,27 dan Kabupaten Sukoharjo sebesar 9,84, serta di atas capaian Wonogiri (7,67) dan Sragen (7,87). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)
Kabupaten Karanganyar ◀◀◀◀



Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar 2024

Gambar 2.8.
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga 2023 (Tahun)

2. Kesehatan

a. Angka Harapan Hidup

Aspek kesehatan merupakan unsur penting yang berkaitan dengan kapabilitas penduduk. Derajat kesehatan pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa lama harapan hidup yang mampu dicapai. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai merefleksikan semakin tinggi derajat kesehatannya. Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat. Tren perkembangan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023, AHH penduduk Kabupaten Karanganyar adalah sebesar 77,72 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2019-2023, angka tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan. Hal tersebut berarti bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2023, rata-rata penduduk Kabupaten Karanganyar dapat bertahan hidup, yaitu sampai usia 77-78 tahun.

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah jumlah kasus kematian ibu dan Angka Kematian Ibu (AKI). Jumlah kasus kematian ibu Kabupaten Karanganyar tahun 2019-2023 terus menurun, kecuali di tahun 2020 dan 2021 akibat dari adanya Covid-19. Pada tahun 2019 terdapat 6 kasus kematian ibu, kemudian meningkat sangat tinggi di tahun 2021 menjadi 19 kasus. Pada tahun 2023 jumlah kasus kematian ibu menurun, hanya di temukan 4 kasus kematian ibu. Beberapa penyebab masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan.

Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan kongenital pada bayi, dan komplikasi kehamilan. Perkembangan AKB di Kabupaten Karanganyar selama kurun waktu tahun 2019-2023 menunjukkan tren menurun dari 8,36 per 1.000 KH pada tahun 2019 menjadi 6,89 per 1.000 KH pada tahun 2023. Namun demikian masih diperlukan upaya penanganan untuk tetap menurunkan angka kematian bayi di Kabupaten Karanganyar antara melalui peningkatan pendampingan kelas ibu hamil dan balita, serta optimalisasi peran Posyandu.

Tabel 2.4.
Usia Harapan Hidup (UHH), Kasus Kematian Ibu, dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	77,38	77,47	77,55	77,64	77,72
2	Jumlah kasus kematian Ibu	Kasus	6	8	19	6	4
3	Angka Kematian Bayi (AKB)/1.000 KH	Per 1.000 KH	8,36	8,4	8,33	7,20	6,89

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Karanganyar 2024

Balita gizi buruk di Kabupaten Karanganyar masih ditemukan dari tahun ke tahun. Namun kenaikan dan penurunannya tidak signifikan selama lima tahun terakhir. Tahun 2019, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Karanganyar tercatat 0,03%, kemudian menurun menjadi 0,2% di tahun 2020-2022 dan di tahun 2023 tercatat 0,03%. Beberapa hal telah diupayakan untuk mengurangi kasus balita gizi buruk antara lain melalui intensifikasi pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu dan dilanjutkan dengan penentuan status gizi oleh bidan di desa atau petugas kesehatan lainnya. Selain itu juga dilakukan pemberian makanan tambahan dan perawatan kepada balita gizi buruk.

Sedangkan terkait dengan kondisi stunting di Kabupaten Karanganyar dalam lima tahun terakhir (2019-2023) angka prevalensinya cenderung fluktuatif. Prevalensi Stunting menurut data EPPBGM pada tahun 2023 sebesar 4,3% sedangkan menurut data dari SKI/SSGI 22,2%. Masih adanya kasus stunting di Kabupaten Karanganyar disebabkan oleh beberapa hal antara lain minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman, ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi,

risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.

Tabel 2.5.
Kondisi Gizi Buruk dan Stunting di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Balita Gizi Buruk	%	0,03	0,02	0,02	0,02	0,03
2	a) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (DATA EPPBGM)	%	6,3	5,86	4,48	3,33	4,3
	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (DATA SSGI/SKI)	%	na	na	16,2	22,3	22,2

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Karanganyar 2024

Tuberkulosis adalah penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh *mycobacterium*, yang berkembang biak di dalam bagian tubuh di mana terdapat banyak aliran darah dan oksigen. Tuberkulosis adalah penyakit yang paling umum yang dialami oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena masyarakat kurang bisa menjaga kebersihan yang ada dilingkungannya. Permasalahan penanggulangan TBC di Kabupaten Karanganyar masih terkait dengan penemuan dan pengobatan dan angka keberhasilan pengobatan kasus yang belum mencapai 100%. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) dan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6.
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
menular Tuberkulosis (TB) di Kabupaten Karanganyar Tahun
2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	34,4	60,6	34,5	34,5	90,4
2	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	101,7	95	93,4	93,4	92,8

Sumber : Dinas Kesehatan, Kabupaten Karanganyar 2024

3. Perekonomian

a. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per kapita merupakan Produk Domestik Regional Bruto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per Kapita atas dasar harga Berlaku mencerminkan nilai PDRB dan per (orang) penduduk. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan dapat mencerminkan pertumbuhan nyata pendapatan per kapita penduduk di wilayah bersangkutan.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karanganyar berdasar ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, kecuali di tahun 2020 mengalami penurunan, sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat dengan adanya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Berdasarkan PDRB ADHB 2019 sebesar 41.751,04 ribu rupiah, menjadi 49.421,80 ribu rupiah di tahun 2023. PDRB Per kapita ADHK 2010 tahun 2019 sebesar 30.051,46 ribu rupiah dan meningkat menjadi 31.627,82 ribu rupiah di tahun 2023. PDRB Per kapita ADHB dan ADHK menunjukkan adanya peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karanganyar mengalami peningkatan yang semakin

baik. Selengkapnya terkait perkembangan PDRB Per kapita ADHB dan ADHK tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.7.
PDRB Per Kapita Tahun 2019-2023

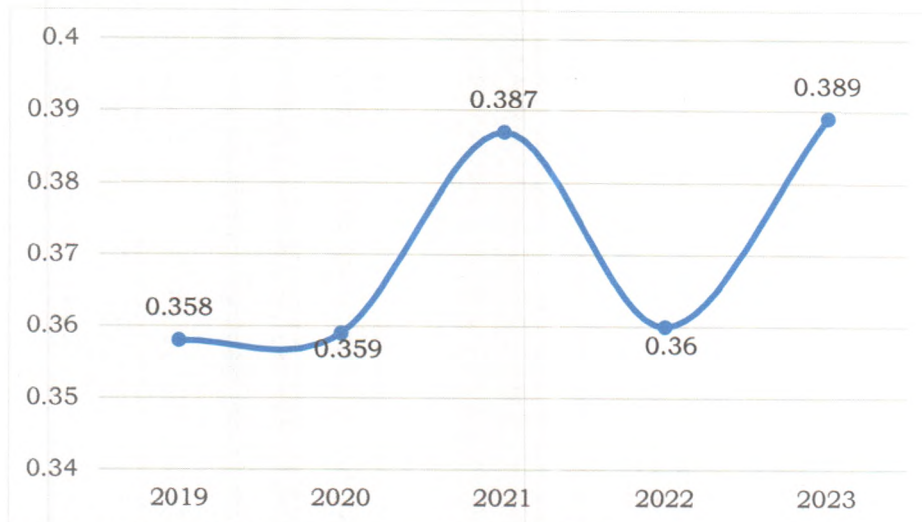
Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita (Ribuan Rupiah)	
				ADHB	ADHK
2019	37.013.093.960,00	26.641.186.380,00	886.519	41.751,04	30.051,46
2020	37.023.453.390,00	26.103.228.360,00	931.963	39.726,31	28.008,87
2021	39.157.212.600,00	27.039.607.960,00	938.808	41.709,50	28.802,06
2022	43.087.760.280,00	28.624.989.890,00	947.642	45.468,39	30.206,54
2023	47.203.554.400,00	30.208.236.040,00	955.116	49.421,80	31.627,82

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar 2024

b. Indeks Gini

Perkembangan indeks gini Kabupaten Karanganyar pada interval tahun 2019-2023 terjadi fluktuasi. Pada tahun 2016, BPS Kabupaten Karanganyar tidak melakukan perhitungan Indeks Gini lagi. Sehingga meletakkan angka indeks gini tahun 2016 – 2020 menggunakan angka Provinsi Jawa Tengah, sedangkan pada tahun 2021-2023 BPS kembali melakukan perhitungan terkait indeks gini.

Pada tahun 2019 indeks gini Kabupaten Karanganyar sebesar 0,387, kemudian menurun menjadi 0,36 di tahun 2022. Menurunnya indeks gini tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dalam masyarakat Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan sejalan dengan tujuan ke-10 SDG’s yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara. Namun pada tahun 2023 indeks gini Kabupaten Karanganyar meningkat menjadi 0,389. Angka tersebut menunjukkan bahwa persebaran pendapatan di Kabupaten Karanganyar masuk dalam katagori ketimpangan moderat. Selengkapnya terkait perkembangan indeks gini Kabupaten Karanganyar tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



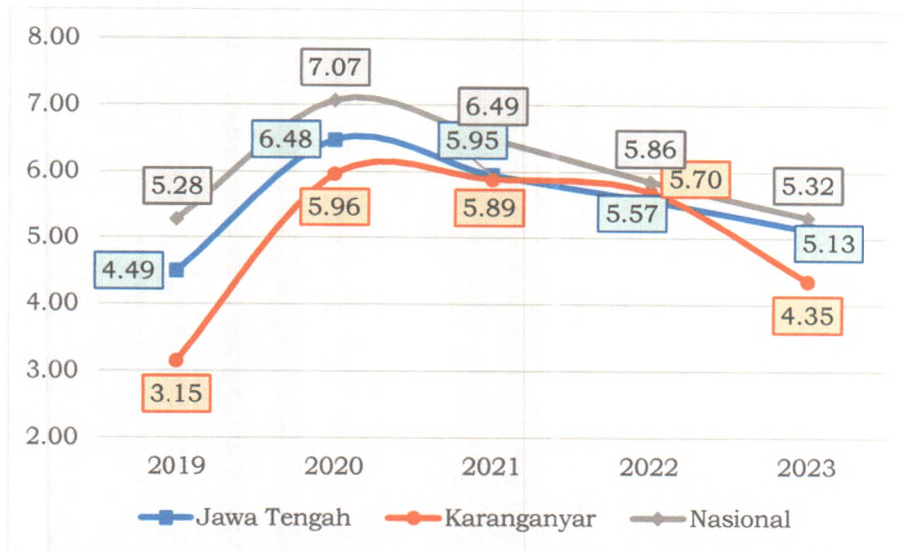
Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar 2024

Gambar 2.9.
Indeks Gini Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

c. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Karanganyar. TPT pada periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif dan tren meningkat di tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2019 TPT Kabupaten Karanganyar sebesar 4,49%, mengalami meningkat menjadi 5,96% pada tahun 2020 dan 5,89% di tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak pekerja yang diberhentikan. Selain itu banyaknya usaha (terutama UMKM) yang terdampak bahkan gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 4,35%. Jika dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa tengah dan Nasional capaian TPT Kabupaten Karanganyar lebih rendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)
Kabupaten Karanganyar ◀◀◀◀



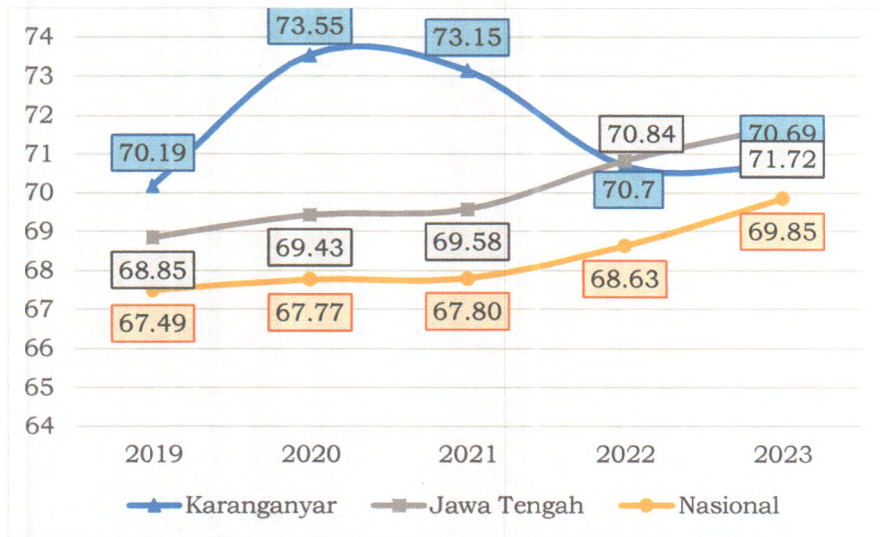
Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar 2024

Gambar 2.10.
Persentase TPT Kab. Karanganyar Tahun 2019-2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Besarnya TPAK menunjukkan kondisi yang baik dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan. Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Karanganyar yang bersifat fluktuatif, yaitu tahun 2019 sebesar 69,58% meningkat menjadi 70,69% pada tahun 2023. Penurunan TPAK pada tahun 20232 di Kabupaten Karanganyar menunjukkan capaian sebesar 70,69% termasuk cukup baik, hal ini sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Karanganyar.

Capaian TPAK Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 berada di bawah capaian Jawa Tengah dan di atas capaian Nasional. Selengkapnya terkait perkembangan TPAK Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

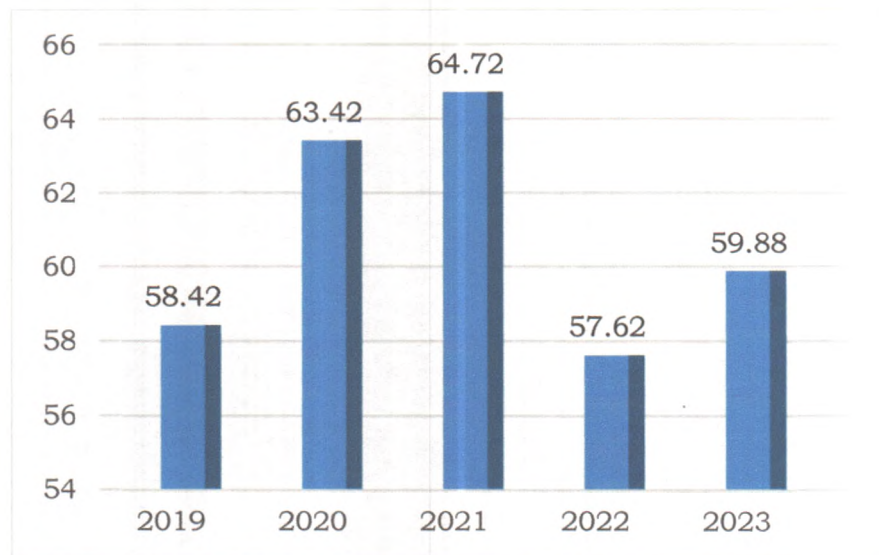
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)
Kabupaten Karanganyar ◀◀◀◀



Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar 2024

Gambar 2.11.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Karanganyar Tahun 2019-2023

TPAK perempuan menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja perempuan (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Pada tahun 2019 TPAK perempuan sebesar 58,42%, kemudian di tahun 2023 sebesar 59,88%. Semakin tinggi TPAK perempuan menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) perempuan yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

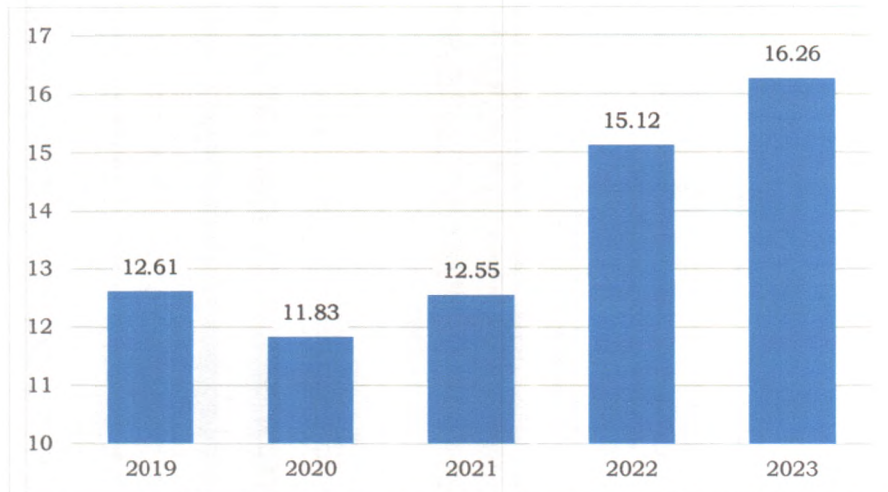


Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar 2024

Gambar 2.12.
TPAK Perempuan Kab. Karanganyar Tahun 2019-2023

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Kabupaten Karanganyar. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2019-2023 cenderung mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2020 sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya PHK atau pekerja yang dirumahkan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2019 sebesar 12,61%. Namun di tahun 2020 turun menjadi 11,83 dan mampu meningkat kembali menjadi 16,26% di tahun 2023. Selengkapnya terkait cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)
Kabupaten Karanganyar ◀◀◀◀



Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Gambar 2.13.

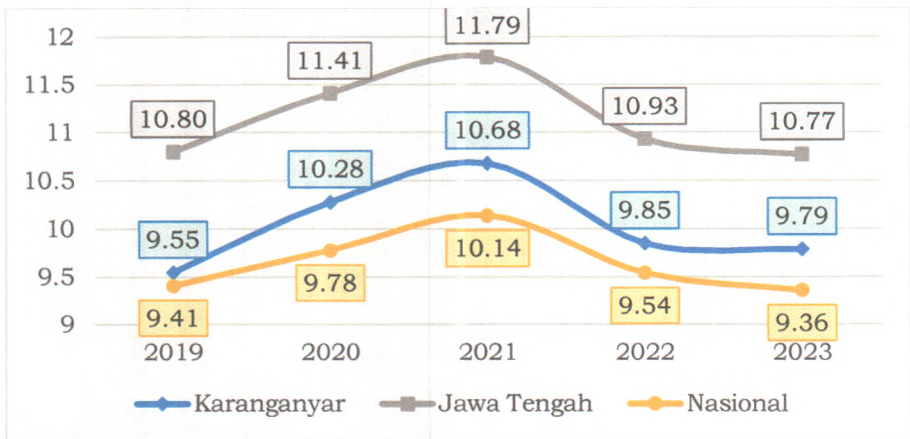
**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023**

d. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid 19 pada tahun 2020 dan perubahan iklim ekstrem yang terjadi, pada tahun 2019 sebesar 9,55%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 10,28% dan tahun 2021 menjadi 10,68%, Hal ini dikarenakan tingkat pendapatan masyarakat yang menurun yang disebabkan oleh terjadinya PHK, pekerja yang dirumahkan, pembatasan kegiatan masyarakat. Angka kemiskinan dapat turun kembali pada tahun 2022 menjadi 9,85%, dan di tahun 2023 menjadi 9,79%.

Jika dibandingkan dengan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa tengah, capaian Kemiskinan Kabupaten Karanganyar relatif lebih rendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian nasional, angka kemiskinan Kabupaten Karanganyar lebih tinggi. Selengkapnya terkait perkembangan angka kemiskinan dalam kurun waktu 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)
Kabupaten Karanganyar <<<<

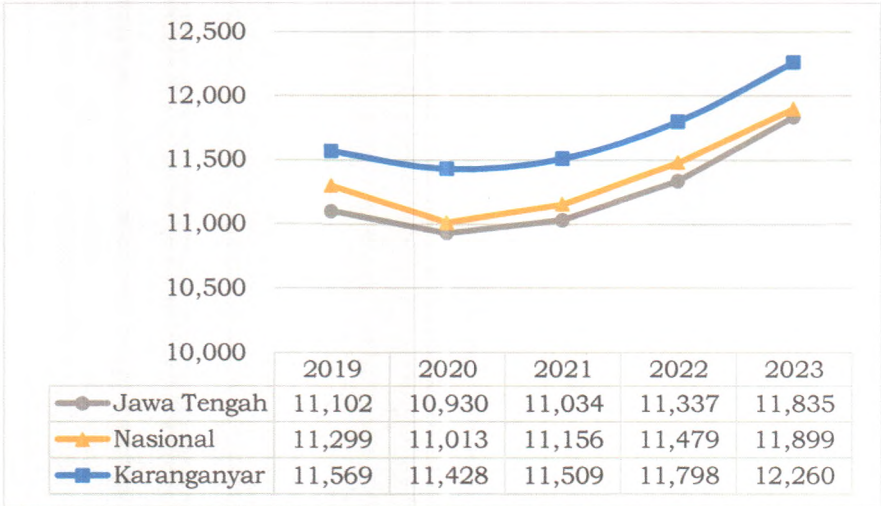


Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar 2024

Gambar 2.14.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

e. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Karanganyar mengalami tren peningkatan dari Rp.11.569 ribu pada tahun 2019, menjadi Rp.11.428 ribu di tahun 2020. Angka tersebut mengalami penurunan akibat pandemi covid. Namun dapat kembali meningkat menjadi Rp. 11.798 ribu per tahun di tahun 2023. Pengeluaran per kapita Kabupaten Karanganyar masih di atas capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat pada gambar berikut.

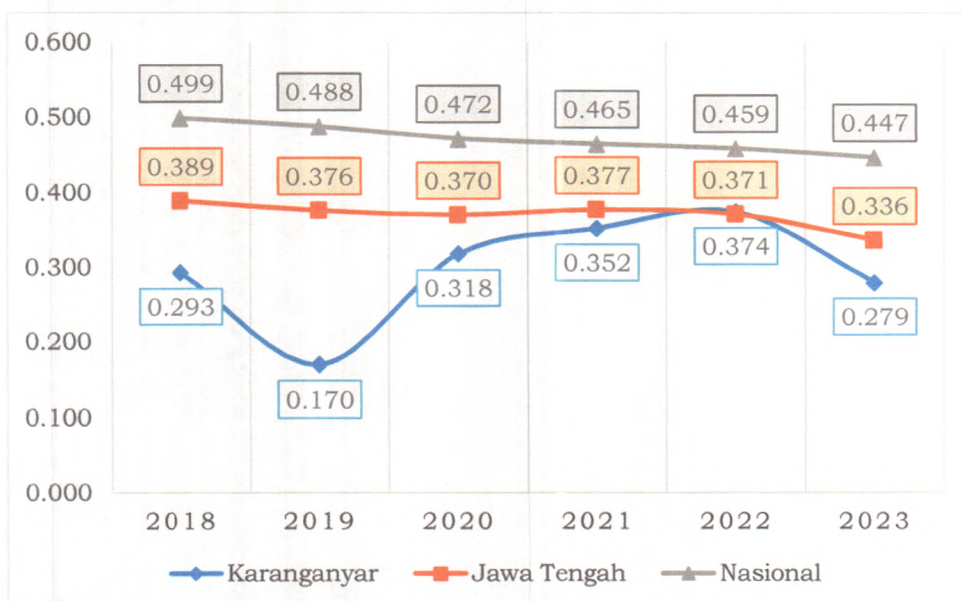


Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar 2024

Gambar 2.15.
Pengeluaran per Kapita Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Serta Nasional Tahun 2019-2023 (Ribuan Rupiah)

2.4. Pembangunan Keluarga

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ini merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Pada tahun 2018 IKG Kabupaten Karanganyar sebesar 0,293 namun menurun menjadi 0,279 di tahun 2023. Capaian IKG Kabupaten Karanganyar masih di bawah nasional dan di atas Jawa Tengah. Penurunan ketimpangan gender harus terus ditekan. Angka tersebut menunjukkan kesetaraan antara pria dan perempuan semakin meningkat di Kabupaten Karanganyar. Artinya, ketimpangan gender semakin mengecil. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

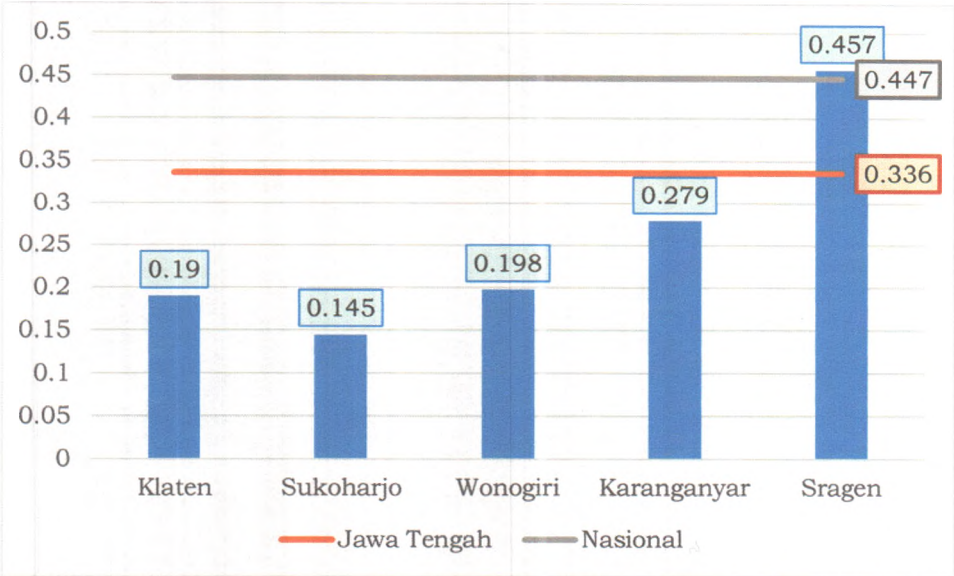


Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karanganyar 2024

Gambar 2.16.
Perkembangan IKG Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

IKG di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya, angka capaiannya berada di atas Kabupaten Sragen (0,457). Namun capaian tersebut berada di atas capaian Kabupaten Klaten (0,190), Kabupaten Sukoharjo (0,145), dan Kabupaten Wonogiri (0,198). Capaian tersebut

menunjukkan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Karanganyar lebih tinggi daripada di Kabupaten Sragen. Sedangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo lebih tinggi daripada di Karanganyar. Selengkapnya terkait IKG Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten lain di sekitarnya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karanganyar 2024

Gambar 2.17.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Tetangga Tahun 2023

Kualitas kesejahteraan keluarga digambarkan melalui indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga). Indeks ini dikembangkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mengukur keberhasilan pembangunan keluarga berdasarkan tiga dimensi utama yaitu ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Indeks ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi keluarga di Kabupaten Karanganyar dan membantu pemerintah merancang kebijakan serta program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. iBangga Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 sebesar 66,62. Nilai IPKK yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.

Dalam rangka pembangunan keluarga menuju pada terwujudnya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera yang bersendikan keluarga dalam perkawinan yang syah. Keluarga terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau yang disebut dengan keluarga batih (*nucleus family*). Dan ada pula keluarga besar (*extended family*) yaitu keluarga batih ditambah dengan anggota-anggota keluarga lainnya, baik masih dalam hubungan darah/keturunan maupun bukan keturunan, namun dalam hubungan sosial keluarga. Keluarga batih dan keluarga besar menjadi dasar bagi terbentuknya persekutuan, persaudaraan dan hubungan sosial masyarakat yang memiliki solidaritas sosial.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang menjalankan fungsi-fungsi sosial, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta fungsi-fungsi sosial lainnya. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, baik secara fisik maupun sosial, yaitu hubungan antar individu yang selaras dan serasi dengan lingkungan masyarakat sekitar.

Kebijakan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga diarahkan pada upaya peningkatan ketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni dengan fasilitasi dari pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan memfasilitasi dan arahan menuju tercapainya peningkatan : (1) Keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Keluarga berwawasan nasional dan berkontribusi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara; (3) Pengembangan keluarga sejahtera yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Peran keluarga dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial budaya, sosial ekonomi dan membina keluarga semakin sejahtera belum secara optimal dapat terlaksana. Demikian pula fungsi kesehatan berintikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat, kesehatan lingkungan dan mengerti tentang kesehatan reproduksi (termasuk

pemahaman tentang alat-alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja dan generasi muda pada umumnya. Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan keluarga di Kabupaten Karanganyar, lain sebagai berikut :

1. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Karanganyar (2023) sebesar 4,35% dan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,85% maka penanganan pengangguran perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan keluarga.
2. Banyaknya kasus perceraian dalam rumah tangga di Kabupaten Karanganyar (tahun 2023) sebanyak 917 kasus.
3. Masih terdapat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang belum terbina melalui panti-panti sosial atau dalam lingkungan keluarga, masih terdapat yang terlantar dan belum terpenuhi hak-hak dasarnya. Hal yang berkaitan dengan ketahanan keluarga, terutama permasalahan masih belum optimalnya partisipasi keluarga dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, peningkatan wawasan kebangsaan, masih rentannya kelompok masyarakat tertentu terkait dengan konflik sosial dan menurunnya nilai-nilai kegotong-royongan masyarakat dan kearifan lokal.
4. Masih terdapat keluarga yang belum dapat memenuhi hak dasar anggota keluarga, terutama kelompok miskin dan rentan dalam bidang kesehatan, pendidikan sesuai dengan wajib belajar 12 tahun, meskipun fasilitas dan pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Karanganyar telah merata dan relatif lengkap.

Sedangkan perkembangan lingkungan strategis (lingkungan eksternal) Kabupaten Karanganyar yang berpengaruh bagi peningkatan ketahanan keluarga antara lain sebagai berikut :

1. Secara umum kebijakan yang diarahkan pada pengendalian perkembangan kependudukan dan peningkatan pembangunan keluarga sejahtera dan berkualitas semakin mendapatkan perhatian sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

2. Arahan kebijakan tentang pentingnya kelengkapan dokumen administrasi kependudukan yang menjadi hak setiap warga negara melalui pelayanan publik dalam bentuk pelayanan dokumen kependudukan dan keluarga semakin ditingkatkan sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan dokumen administrasi kependudukan dilakukan secara cepat dan mudah telah dilaksanakan di Kabupaten Karanganyar.
3. Kebijakan nasional terkait dengan peningkatan pelayanan dasar yang memperhatikan peningkatan pendidikan melalui Program Wajib Belajar 12 tahun, bea siswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk menyelesaikan pendidikan dasar, pendidikan menengah serta pendidikan kejuruan, pendidikan non formal serta pelayanan pendidikan tinggi bagi anak dari keluarga miskin (melalui : Program Bidik Misi, bea siswa bagi keluarga miskin dan bea siswa dari kalangan dunia usaha melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan);
4. Peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan peningkatan sumberdaya manusia di Kabupaten Karanganyar dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah yang berwenang. Secara umum dilaksanakan pula kebijakan dengan skema Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat dan Program Keluarga Harapan (PKH) pelayanan lainnya kepada kelompok masyarakat miskin.
5. Arahan penanggulangan kemiskinan secara nasional melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan secara terpadu (penanganan kemiskinan yang terpadu dengan penanganan pengangguran, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas tenaga kerja) dilaksanakan oleh satuan perangkat daerah yang terkait secara terpadu.
6. Peningkatan dan fasilitasi perintisan dan pengembangan usaha rumah tangga, pelaku usaha mikro dan kecil melalui legalitas usaha

dan pemberian dan fasilitasi permodalan baik melalui kredit permodalan bagi UMKM dan bantuan modal usaha.

2.5. Persebaran dan Mobilitas Penduduk
a. Persebaran Penduduk

Persebaran penduduk harus diikuti dengan kemampuan satu wilayah dalam memberikan daya dukung terhadap kebutuhan penduduk, dalam hal ini luas wilayah. Luas wilayah Kabupaten Karanganyar sebesar 767,79 km², terdiri dari 17 kecamatan. Pembangunan dimasing-masing wilayah kecamatan harus dilakukan secara merata, hal ini agar tidak terjadi mobilitasi penduduk kesatu wilayah. Pembangunan yang tidak merata akan mengakibatkan mobilitasi penduduk menuju wilayah dengan pembangunan yang maju. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi terdapat pada Kecamatan Colomadu yaitu sebesar 4.822 jiwa/km² Berikut persebaran penduduk di Kabupaten Karanganyar tahun 2023.

Tabel 2.8.
Persebaran Penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	% Jumlah Penduduk	Luas (km2)	% luas	Kepadatan (jiwa/ km2)
1	Jatipuro	35.266	3,69	34,37	4,48	1.027
2	Jatiyoso	40.142	4,21	67,16	8,75	598
3	Jumapolo	43.724	4,58	55,67	7,25	786
4	Jumantono	50.810	5,32	53,55	6,98	950
5	Matesih	45.433	4,76	26,27	3,42	1.731
6	Tawangmangu	47.663	4,99	70,03	9,12	681
7	Ngargoyoso	37.762	3,96	65,34	8,51	578
8	Karangpandan	44.480	4,66	34,11	4,44	1.305
9	Karanganyar	86.750	9,09	43,03	5,60	2.017
10	Tasikmadu	68.996	7,23	27,60	3,59	2.502
11	Jaten	84.650	8,87	25,55	3,33	3.315
12	Colomadu	76.035	7,90	15,64	2,04	4.822
13	Gondangrejo	90.230	9,45	56,80	7,40	1.590
14	Kebakkramat	65.122	6,82	36,46	4,75	1.787
15	Mojogedang	71.851	7,53	53,31	6,94	1.349
16	Kerjo	38.486	4,03	46,82	6,10	823
17	Jenawi	27.716	2,90	56,08	7,30	495
Kabupaten Karanganyar		955.116	100,00	767,79	100,00	1.244

Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar 2024

Persebaran penduduk Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 menunjukkan bahwa persentase jumlah penduduk dan persentase luas wilayah kecamatan sudah seimbang. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,33%, sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,74%. Berikut perkembangan pertumbuhan penduduk di masing-masing kecamatan di Kabupaten Karanganyar.

Tabel 2.9.
Persentase Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Karanganyar

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jatipuro	0,65	2,13	2,14	1,79	1,49
2	Jatiyoso	0,64	1,22	0,96	0,91	0,59
3	Jumapolo	0,67	2,05	2,05	1,73	1,41
4	Jumantono	0,60	1,86	1,82	1,55	1,23
5	Matesih	0,63	1,38	1,20	1,08	0,75
6	Tawangmangu	0,74	1,01	0,71	0,72	0,39
7	Ngargoyoso	0,67	1,61	1,49	1,30	0,98
8	Karangpandan	0,66	1,35	1,16	1,06	0,72
9	Karanganyar	0,87	1,25	1,01	0,95	0,62
10	Tasikmadu	0,91	1,69	-	0,01	1,05
11	Jaten	0,87	0,71	0,30	0,41	0,08
12	Colomadu	1,41	0,56	0,08	0,25	0,23
13	Gondangrejo	1,05	1,73	1,66	1,43	1,10
14	Kebakkramat	0,86	0,90	0,55	0,60	0,28
15	Mojogedang	0,83	1,72	1,66	1,43	1,09
16	Kerjo	0,63	1,33	1,12	1,03	0,70
17	Jenawi	0,77	1,00	0,68	0,70	0,38
Kabupaten Karanganyar		0,84	1,33	0,98	0,94	0,74

Sumber : BPS, Kabupaten Karanganyar 2024

b. Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk memiliki kaitan erat dengan pembangunan sebab mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Artinya tidak ada pembangunan tanpa mobilitas penduduk dan begitu pula

sebaliknya tidak ada mobilitas penduduk tanpa adanya pembangunan. Tinggi rendahnya mobilitas penduduk di suatu daerah akan berpengaruh terhadap strategi pembangunan yang dipilih, sehingga pembangunan akan betul-betul meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk atau masyarakat yang mendukung pembangunan tersebut. Pada pihak lain intensitas dari pembangunan di suatu daerah juga berpengaruh terhadap mobilitas penduduk, arus mobilitas penduduk ke daerah tersebut akan besar apabila intensitas pembangunannya tinggi, dan begitu juga sebaliknya.

Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Ada 2 macam mobilitas penduduk, yaitu mobilitas penduduk non permanen (sirkuler) dan mobilitas penduduk permanen (migrasi). Mobilitas penduduk non permanen adalah perpindahan yang bersifat tidak tetap/sementara. Sedangkan mobilitas penduduk permanen adalah perpindahan penduduk dengan tujuan menetap.

Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong (*push factor*) suatu wilayah dan daya tarik (*pull factor*) wilayah lain. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke tempat lain, antara lain karena di daerah tersebut tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan yang tidak terlepas dari kemiskinan dan pengangguran. Beberapa ahli, Lee (1966), Todaro (1979), Titus (1982) dalam Mantra (1989), berpendapat bahwa motivasi seseorang untuk pindah adalah motif ekonomi. Motif tersebut berkembang karena adanya ketimpangan ekonomi antar daerah. Todaro menyebutkan motif utama tersebut sebagai pertimbangan ekonomi yang rasional. Mobilitas ke perkotaan mempunyai dua harapan yaitu memperoleh pekerjaan dan harapan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi daripada yang diperoleh dipedesaan. Dengan demikian mobilitas desa kota sekaligus mencerminkan adanya

ketidakseimbangan antara desa dan kota, oleh karena itu, arah pergerakan penduduk juga cenderung menuju kota yang memiliki kekuatan-kekuatan ekonomi yang lebih besar dan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Sedangkan daya tarik wilayah adalah jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk dari wilayah lain di sekitarnya, sehingga daya tarik ini menyebabkan penduduk bermigrasi untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Migrasi neto merupakan selisih antara peristiwa migrasi masuk dengan migrasi keluar. Migrasi neto ini bermanfaat untuk mengetahui apakah suatu kabupaten/kota merupakan daerah yang memiliki daya tarik bagi penduduk wilayah sekitarnya atau wilayah lainnya. Dapat juga ditentukan apakah suatu kabupaten/kota merupakan wilayah yang tidak disenangi untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan kata lain kabupaten/kota ini memiliki daya dorong bagi penduduknya untuk pergi meninggalkan daerah tersebut.

2.6. Data dan Informasi dan Penataan Kependudukan

Berdasarkan Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan secara nasional telah disusun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang utuh dan terpadu secara nasional. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara terintegrasi merupakan pengakuan dan pengesahan bagi seluruh warga negara melalui penerbitan dokumen kependudukan, terdiri dari : Akta Kelahiran, kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Akta Catatan Sipil dan Akta Kematian. Sesuai amanat undang-undang tersebut sebagai landasan hukum pelaksanaan database kependudukan secara nasional dengan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional.

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara nasional pada gilirannya nanti sangat bermanfaat bagi perumusan kebijakan dan kepentingan perhitungan potensi sumberdaya manusia, kepentingan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah (Pemilu/Pilkada), perpajakan dan lain-lain. Data base kependudukan merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan berbasis teknologi informatika. Untuk membangun basis data kependudukan dan pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan kepentingan pembangunan bidang-bidang lainnya.

Setiap penduduk Indonesia memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang berlaku secara nasional. NIK tersebut bersifat unik, khas dan tunggal dan melekat dan berlaku pada individu selama menjadi penduduk Indonesia. Di masa mendatang NIK tersebut akan dicantumkan pada setiap dokumen kependudukan dan menjadi dasar untuk penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil lainnya.

Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang peningkatan kualitas layanan adminduk, menyatakan bahwa bagi penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar. Perkembangan persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Karanganyar tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dari 74,88% menjadi 92,64%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10.
Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan
Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Rata rata Capaian Kepemilikan KK, Perekaman Wajib KTP, Kepemilikan KIA, Akte Kelahiran & Akte Kematian)	%	74,88	85,08	92,36	91,76	92,64
2	Cakupan Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk	%	NA	86,32	93,1	92,1	92,85
3	Cakupan Penerbitan Dokumen Peristiwa Penting / Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian)	%	98,1	98,46	99,08	99,57	99,73

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar 2024

Pemanfaatan data kependudukan adalah aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Persentase perjanjian kerjasama dan pemanfaatan data adminduk dengan Perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar di tahun 2023 sebesar 65,85%. Selengkapnya terkait indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.11.
Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase perjanjian kerjasama dan pemanfaatan data adminduk dengan OPD	%	na	77,5	77,5	70,73	65,85
2	Terlaksananya kerjasama pemanfaatan data dengan OPD dan stakeholder	Kerjasama	na	31	31	29	27
3	Inovasi pelayanan adminduk	Inovasi	1	2	2	5	3

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)
Kabupaten Karanganyar ◀◀◀◀

No	Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
4	Tersusunnya buku profil data kependudukan	Buku	1	1	1	1	1
5	Tersusunnya buku data kependudukan	Buku	2	2	2	2	2
6	Cakupan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital	%	na	na	na	na	7,95
8	Presentasi Penerapan Buku Pokok Pemakaman di Desa/Kelurahan	%	na	na	na	na	100
9	Cakupan Pelaksanaan SIAK Desa/Kelurahan	Desa/ Kelurahan	na	na	na	na	na

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar 2024

BAB III

PROYEKSI PENDUDUK DAN KONDISI IDEAL KEPENDUDUKAN

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kependudukan yang berkelanjutan dan terarah, penting bagi kita untuk memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika kependudukan di masa depan serta gambaran kondisi ideal yang ingin dicapai. Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai proyeksi penduduk dan kondisi ideal kependudukan sebagai landasan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kependudukan di Kabupaten Karanganyar.

Proyeksi penduduk merupakan suatu estimasi ilmiah tentang jumlah, struktur, dan distribusi penduduk di masa mendatang berdasarkan asumsi-asumsi demografis yang relevan. Melalui proyeksi ini, dapat diantisipasi berbagai tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam konteks kependudukan, sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk menghadapinya.

Sementara itu, kondisi ideal kependudukan merujuk pada suatu keadaan di mana jumlah, kualitas, dan persebaran penduduk selaras dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan. Pencapaian kondisi ideal ini menjadi tujuan utama dari pembangunan kependudukan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan.

Dalam bab ini, akan disampaikan berbagai aspek proyeksi penduduk, Selain itu, kita juga akan membahas secara rinci mengenai karakteristik dan indikator-indikator kondisi ideal kependudukan yang ingin dicapai, serta langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh untuk mewujudkannya.

Perhitungan proyeksi perkembangan kependudukan berdasarkan pada hasil perhitungan yang ada dalam Perda 4 tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Karanganyar 2025–2045, (berdasarkan perhitungan per 5 tahunan) sebagai berikut :

3.1. Kuantitas penduduk :**3.1.1. Penduduk Berdasarkan Jumlah dan Jenis Kelamin**

Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Karanganyar diproyeksikan akan mengalami peningkatan dari 465.958 jiwa pada tahun 2020 menjadi 518.494 jiwa pada tahun 2045, dengan pertumbuhan sebesar 11,27% selama periode 25 tahun tersebut. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan populasi laki-laki yang relatif moderat namun konsisten.

Analisis berdasarkan kelompok umur menunjukkan adanya perubahan struktur demografis yang penting. Kelompok usia 0-14 tahun (anak-anak dan remaja awal) diproyeksikan mengalami penurunan dari 106.245 jiwa pada tahun 2020 menjadi 94.982 jiwa pada tahun 2045. Penurunan ini mengindikasikan adanya tren penurunan tingkat kelahiran atau fertilitas di Kabupaten Karanganyar. Sementara itu, kelompok usia produktif (15-64 tahun) diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan dari 320.933 jiwa pada tahun 2020 menjadi 341.429 jiwa pada tahun 2045. Peningkatan ini, meskipun tidak terlalu signifikan, menunjukkan adanya potensi tenaga kerja yang relatif stabil dalam jangka panjang.

Peningkatan signifikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki terdapat pada kelompok usia 65 tahun ke atas (lansia). Jumlah penduduk laki-laki lansia diproyeksikan meningkat dari 38.780 jiwa pada tahun 2020 menjadi 82.083 jiwa pada tahun 2045, dengan pertumbuhan lebih dari dua kali lipat. Hal ini mengindikasikan adanya proses penuaan populasi yang cepat di kalangan penduduk laki-laki Kabupaten Karanganyar.

Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa proyeksi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam distribusi usia penduduk laki-laki. Kelompok usia 30-49 tahun, yang merupakan inti dari tenaga kerja produktif, diproyeksikan akan mengalami sedikit penurunan dari 138.830 jiwa pada tahun 2020 menjadi 140.489 jiwa pada tahun 2045. Meskipun penurunan ini tidak signifikan, hal ini menunjukkan perlunya fokus pada peningkatan produktivitas dan keterampilan kelompok usia ini untuk mempertahankan dan meningkatkan output ekonomi daerah.

Proyeksi juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada kelompok usia 50-64 tahun, dari 77.753 jiwa pada tahun 2020 menjadi 98.323 jiwa pada tahun 2045. Peningkatan ini mengindikasikan perlunya perhatian khusus pada kebijakan terkait persiapan pensiun, pelatihan ulang (reskilling) untuk pekerja yang lebih tua, dan penyediaan lapangan kerja yang sesuai untuk kelompok usia ini. Adapun proyeksi penduduk laki-laki dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 3.1.
Proyeksi Jumlah Penduduk Laki-Laki Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2045

Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	35.980	32.790	32.116	31.699	31.405	31.170
5-9	34.408	36.199	32.999	32.323	31.911	31.615
10-14	35.857	34.702	36.517	33.286	32.609	32.197
15-19	35.774	35.985	34.834	36.662	33.416	32.740
20-24	34.501	35.744	35.960	34.813	36.651	33.401
25-29	34.075	34.326	35.566	35.784	34.644	36.476
30-34	33.887	34.033	34.279	35.523	35.741	34.604
35-39	36.247	34.001	34.140	34.392	35.642	35.865
40-44	35.697	36.300	34.048	34.191	34.446	35.706
45-49	32.999	35.528	36.134	33.900	34.052	34.314
50-54	30.555	32.385	34.890	35.505	33.332	33.497
55-59	25.150	29.452	31.258	33.727	34.362	32.296
60-64	22.048	23.609	27.711	29.478	31.878	32.530
65-69	16.303	19.765	21.244	25.040	26.735	28.998
70-74	11.270	13.568	16.542	17.906	21.234	22.787
75+	11.207	14.087	17.563	21.906	25.594	30.298
Jumlah	465.958	482.474	495.801	506.135	513.652	518.494

Sumber : Perda 4 tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Karanganyar 2025 – 2045.

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk perempuan Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2045, dapat dilihat adanya tren peningkatan jumlah penduduk perempuan secara keseluruhan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 467.499 jiwa, dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 533.760 jiwa pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 14,17% selama periode 25 tahun tersebut, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 0,57% per tahun.

Analisis berdasarkan kelompok umur menunjukkan beberapa perubahan demografis yang signifikan. Kelompok usia 0-14 tahun (anak-anak dan remaja awal) diproyeksikan mengalami penurunan dari 101.336

jiwa pada tahun 2020 menjadi 91.186 jiwa pada tahun 2045. Penurunan ini mengindikasikan adanya tren penurunan tingkat kelahiran atau fertilitas di Kabupaten Karanganyar.

Sementara itu, kelompok usia produktif (15-64 tahun) diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan dari 321.391 jiwa pada tahun 2020 menjadi 336.948 jiwa pada tahun 2045. Meskipun peningkatan ini tidak terlalu signifikan, hal ini menunjukkan adanya potensi tenaga kerja perempuan yang relatif stabil dalam jangka panjang.

Yang perlu mendapatkan perhatian adalah proyeksi peningkatan signifikan pada kelompok usia 65 tahun ke atas (lansia). Jumlah penduduk perempuan lansia diproyeksikan meningkat dari 44.772 jiwa pada tahun 2020 menjadi 105.626 jiwa pada tahun 2045, lebih dari dua kali lipat dalam periode 25 tahun. Hal ini mengindikasikan adanya proses penuaan populasi yang cepat di kalangan penduduk perempuan Kabupaten Karanganyar.

Perubahan struktur usia ini membawa implikasi penting bagi perencanaan pembangunan daerah. Penurunan jumlah anak-anak dan remaja awal mungkin akan berdampak pada kebutuhan fasilitas pendidikan dasar dan menengah di masa depan. Di sisi lain, peningkatan jumlah lansia perempuan akan memerlukan perhatian khusus dalam hal penyediaan layanan kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas yang ramah lansia, terutama yang berfokus pada kebutuhan spesifik perempuan lanjut usia.

Kelompok usia produktif yang relatif stabil memberikan peluang bagi Kabupaten Karanganyar untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia perempuannya. Namun, dengan meningkatnya jumlah lansia, beban ketergantungan pada kelompok usia produktif juga akan meningkat. Hal ini mengharuskan pemerintah daerah untuk fokus pada peningkatan produktivitas dan keterampilan penduduk perempuan usia kerja untuk mengimbangi tantangan demografis ini.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mengantisipasi perubahan struktur demografis ini dengan merumuskan kebijakan yang komprehensif dan sensitif gender. Fokus kebijakan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk perempuan usia produktif, pengembangan sistem jaminan sosial dan kesehatan yang berkelanjutan

untuk menghadapi peningkatan populasi lansia perempuan, serta penyesuaian infrastruktur dan layanan publik untuk mengakomodasi kebutuhan semua kelompok usia perempuan. Adapun proyeksi penduduk perempuan dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 3.2.
Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2045 (jiwa)

Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	34.381	31.500	30.839	30.420	30.116	29.873
5-9	33.170	34.639	31.736	31.075	30.651	30.349
10-14	33.785	33.507	34.995	32.060	31.390	30.964
15-19	33.902	33.941	33.666	35.163	32.212	31.541
20-24	33.312	33.804	33.844	33.576	35.073	32.124
25-29	33.951	33.186	33.680	33.723	33.460	34.951
30-34	34.224	34.025	33.258	33.758	33.800	33.542
35-39	36.785	34.439	34.246	33.481	33.986	34.029
40-44	35.624	36.964	34.613	34.430	33.664	34.179
45-49	32.985	35.558	36.914	34.580	34.411	33.653
50-54	31.127	32.656	35.235	36.607	34.311	34.157
55-59	27.073	30.486	32.035	34.615	35.996	33.761
60-64	22.408	26.134	29.503	31.066	33.631	35.011
65-69	17.236	21.036	24.653	27.940	29.516	32.025
70-74	12.644	15.328	18.882	22.305	25.425	26.979
75+	14.892	18.807	24.033	30.834	38.596	46.622
Jumlah	467.499	486.010	502.132	515.633	526.238	533.760

Sumber : Perda 4 tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Karanganyar 2025 – 2045.

3.1.2. Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan data proyeksi penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2045, dapat dilihat komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia produktif, belum produktif, dan tidak produktif, serta menghitung angka ketergantungan.

Kelompok penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) pada tahun 2020 berjumlah 207.581 jiwa, dan diproyeksikan akan mengalami penurunan menjadi 186.168 jiwa pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan adanya tren penurunan jumlah penduduk usia muda, yang dapat berdampak pada struktur demografi di masa depan.

Kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun) pada tahun 2020 berjumlah 642.324 jiwa, dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 678.377 jiwa pada tahun 2045. Peningkatan jumlah penduduk usia produktif

ini menandakan adanya potensi bonus demografi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.

Kelompok penduduk usia tidak produktif (65 tahun ke atas) pada tahun 2020 berjumlah 83.552 jiwa, dan diproyeksikan akan meningkat secara signifikan menjadi 187.709 jiwa pada tahun 2045. Peningkatan jumlah penduduk lansia ini mengindikasikan adanya proses penuaan populasi yang perlu diantisipasi dalam perencanaan kebijakan dan layanan publik.

Angka ketergantungan, yang menunjukkan beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia tidak produktif, dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Pada tahun 2020, angka ketergantungan Kabupaten Karanganyar adalah sekitar 45,33%, yang berarti setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 45 orang usia tidak produktif. Proyeksi menunjukkan bahwa angka ketergantungan akan meningkat menjadi sekitar 55,11% pada tahun 2045, yang mengindikasikan peningkatan beban ekonomi bagi penduduk usia produktif.

Tren peningkatan jumlah penduduk lansia dan penurunan jumlah penduduk usia muda menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar akan menghadapi tantangan meningkatnya jumlah lansia dalam 25 tahun ke depan. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan kebijakan, terutama dalam hal penyediaan layanan kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas untuk lansia. Sementara itu, peningkatan jumlah penduduk usia produktif hingga tahun 2045 memberikan peluang bagi daerah untuk memaksimalkan potensi sumber daya manusia guna mendorong pembangunan ekonomi dan sosial.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu mengantisipasi perubahan struktur demografi ini dengan merumuskan kebijakan yang komprehensif, meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan penduduk usia produktif, pengembangan sistem jaminan sosial yang berkelanjutan, serta penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang ramah lansia. Dengan demikian, tantangan demografis yang dihadapi dapat dikelola dengan baik

dan potensi bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun Proyeksi Penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3.
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045 (jiwa)

Kelompok Umur	Tahun Proyeksi					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	70.361	64.290	62.955	62.119	61.521	61.043
5-9	67.578	70.838	64.735	63.398	62.562	61.964
10-14	69.642	68.209	71.512	65.346	63.999	63.161
15-19	69.676	69.926	68.500	71.825	65.628	64.281
20-24	67.813	69.548	69.804	68.389	71.724	65.525
25-29	68.026	67.512	69.246	69.507	68.104	71.427
30-34	68.111	68.058	67.537	69.281	69.541	68.146
35-39	73.032	68.440	68.386	67.873	69.628	69.894
40-44	71.321	73.264	68.661	68.621	68.110	69.885
45-49	65.984	71.086	73.048	68.480	68.463	67.967
50-54	61.682	65.041	70.125	72.112	67.643	67.654
55-59	52.223	59.938	63.293	68.342	70.358	66.057
60-64	44.456	49.743	57.214	60.544	65.509	67.541
65-69	33.539	40.801	45.897	52.980	56.251	61.023
70-74	23.914	28.896	35.424	40.211	46.659	49.766
75+	26.099	32.894	41.596	52.740	64.190	76.920
Jumlah	933.457	968.484	997.933	1.021.768	1.039.890	1.052.254

Sumber : Perda 4 tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Karanganyar 2025 – 2045,

3.1.3. Piramida Penduduk.

Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020-2045, dapat dianalisis terkait dengan rasio penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk perempuan tercatat sebanyak 467.499 jiwa, sementara penduduk laki-laki berjumlah 465.958 jiwa. Hal ini menghasilkan rasio penduduk perempuan terhadap penduduk laki-laki sebesar 1,003, atau dengan kata lain terdapat 1.003 penduduk perempuan untuk setiap 1.000 penduduk laki-laki.

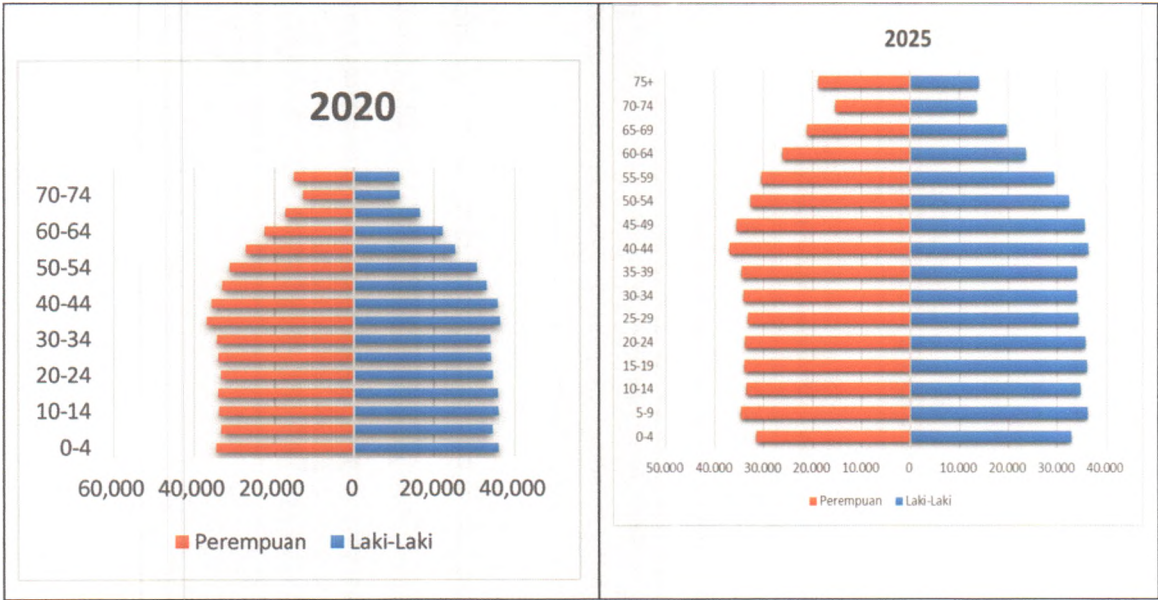
Rasio ini cenderung meningkat dalam proyeksi ke depan. Pada tahun 2025, rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki diproyeksikan menjadi 1,007, dan terus meningkat menjadi 1,010 pada tahun 2030, 1,019 pada tahun 2035, 1,024 pada tahun 2040, serta 1,029 pada tahun 2045.

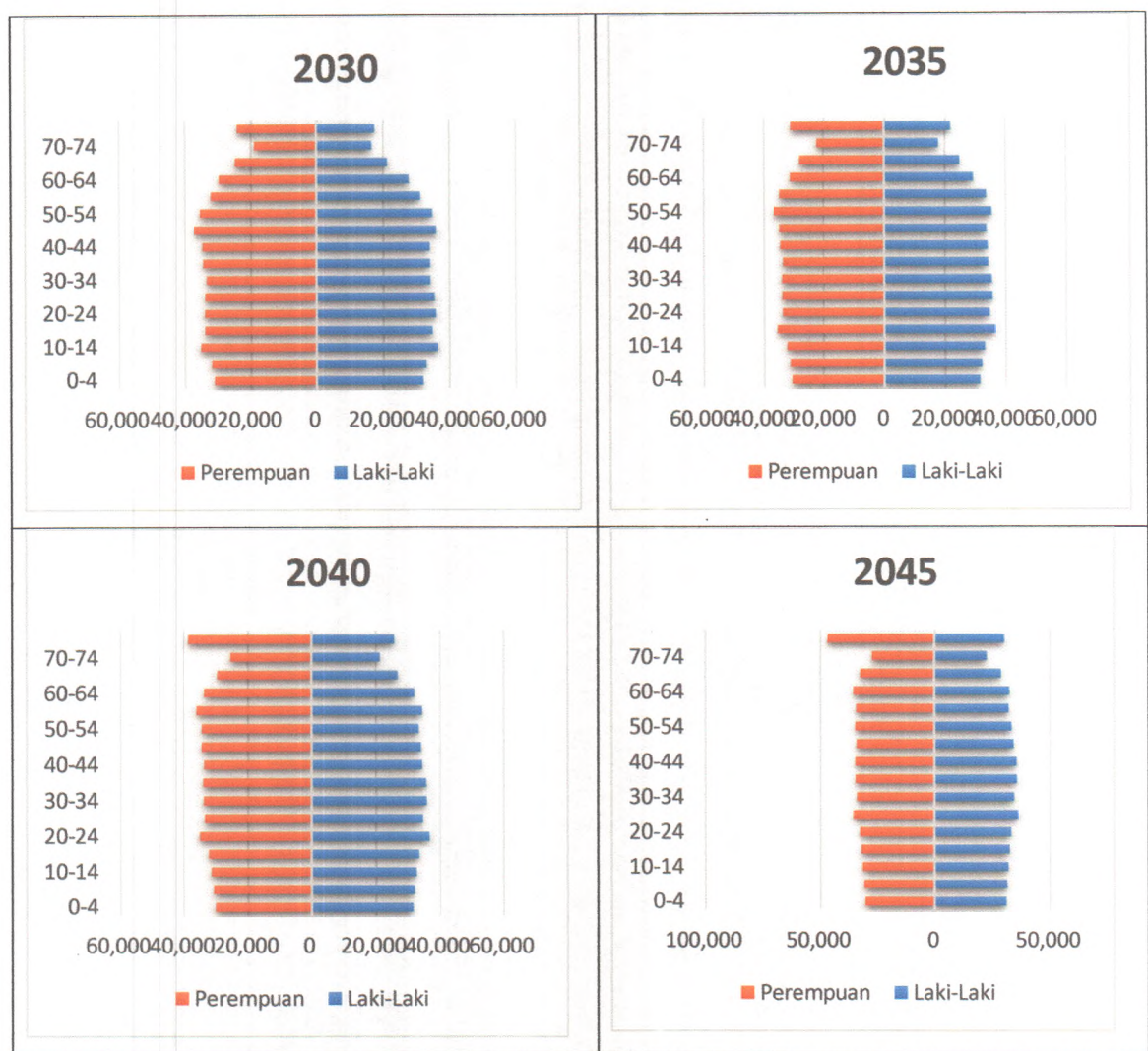
Peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan diproyeksikan akan terus meningkat lebih cepat dibandingkan dengan penduduk laki-laki di Kabupaten Karanganyar dalam jangka waktu 25 tahun ke depan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tren ini adalah perbedaan usia harapan hidup antara laki-laki dan perempuan. Perempuan umumnya memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi daripada laki-laki, sehingga jumlah perempuan, terutama pada kelompok usia lanjut, cenderung lebih banyak.

Implikasi dari peningkatan rasio penduduk perempuan terhadap laki-laki ini antara lain adalah perlunya perhatian dan kebijakan yang responsif gender dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan kesetaraan akses dan kesempatan bagi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun politik.

Selain itu, peningkatan rasio penduduk perempuan juga dapat membawa implikasi pada pola konsumsi, permintaan layanan, serta kebutuhan infrastruktur yang lebih sensitif terhadap kebutuhan perempuan, terutama pada kelompok usia lanjut.





Sumber : Perda 4 tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Karanganyar 2025 – 2045,

Gambar 3.1.
Piramida Penduduk Berdasarkan Proyeksi Penduduk Tahun 2020-2045

3.1.4. Fertilitas Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Diketuinya TFR untuk suatu daerah akan membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia perkawinan, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta untuk mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran. Penting untuk memahami *Total Fertility Rate (TFR)* karena dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan

tantangan yang muncul akibat perubahan dalam tingkat kelahiran. TFR adalah indikator penting dalam perencanaan populasi dan pembangunan berkelanjutan. Adapun perkiraan TFR Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2045 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Perkiraan *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045

No	Periode (Tahun)	Proyeksi TFR
1	2025	1,90
2	2030	1,87
3	2040	1,83
4	2045	1,81

Sumber : Perda 4 tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Karanganyar 2025 – 2045,

Berdasarkan perhitungan proyeksi yang telah dikemukakan, maka diketahui perkembangan TFR di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020–2045 akan mengalami penurunan dalam tingkat kelahiran selama 20 tahun ke depan sebagaimana umumnya Provinsi Jawa Tengah. Penurunan TFR ini memiliki beberapa implikasi yang penting adalah sebagai berikut :

- 1) **Pertumbuhan penduduk yang Lebih Lambat:** Penurunan TFR berarti pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar akan berlangsung dengan tingkat yang lebih lambat daripada sebelumnya. Ini dapat memiliki implikasi pada berbagai aspek, termasuk kebutuhan akan fasilitas publik, layanan kesehatan, dan pendidikan.
- 2) **Penuaan Penduduk:** Penurunan TFR juga dapat menyebabkan penuaan populasi. Dengan jumlah anak yang lebih sedikit yang lahir, bagian penduduk yang lebih tua akan semakin besar, yang bisa mempengaruhi kebutuhan akan layanan kesehatan dan pensiun.
- 3) **Perubahan Sosial dan Ekonomi:** Penurunan TFR sering kali terkait dengan perubahan dalam pola sosial dan ekonomi. Wanita mungkin lebih banyak terlibat dalam angkatan kerja, memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, dan memiliki kontrol yang lebih besar atas keputusan keluarga mereka.
- 4) **Kebijakan Keluarga dan Penduduk:** Proyeksi TFR ini dapat memberikan informasi berharga kepada pemerintah dan pembuat kebijakan untuk

merancang program dan kebijakan yang mendukung perubahan demografis ini, seperti program pendidikan keluarga, program kontrasepsi, dan dukungan untuk perempuan yang ingin mengejar karier.

Selain itu, penting untuk mencatat bahwa proyeksi TFR dapat berubah seiring dengan perubahan dalam faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pemantauan dan analisis terus-menerus terhadap perkembangan demografis sangat penting untuk membantu Kabupaten Karanganyar dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan *Total Fertility Rate* untuk Kabupaten Karanganyar tahun 2020-2045 menunjukkan tren penurunan dalam tingkat kelahiran selama dua puluh lima tahun ke depan. Ini adalah hasil dari perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang berdampak pada keputusan perempuan tentang jumlah anak. Proyeksi ini memberikan pandangan penting tentang perkembangan penduduk Kabupaten Karanganyar yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan perubahan demografis ini.

3.1.5. Mortalitas Kabupaten Karanganyar Tahun 2020-2045

Infant Mortality Rate (IMR) adalah indikator yang digunakan dalam bidang kesehatan untuk mengukur jumlah kematian bayi di bawah usia satu tahun per seribu kelahiran hidup dalam suatu populasi atau wilayah dalam jangka waktu tertentu. IMR merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kualitas perawatan kesehatan dan kondisi kesehatan suatu populasi.

Penting untuk dipahami bahwa IMR mencerminkan tingkat kematian bayi dalam suatu wilayah atau populasi, yang sering kali menjadi indikator penting dalam mengevaluasi perawatan medis, sanitasi, gizi, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kesehatan bayi. Semakin rendah IMR, semakin baik kualitas perawatan kesehatan dan lingkungan yang ada dalam suatu wilayah.

IMR adalah salah satu ukuran yang penting dalam mengevaluasi kemajuan suatu negara atau wilayah dalam upaya meningkatkan kesehatan

anak-anak. IMR mencerminkan keselamatan dan kesejahteraan bayi yang merupakan aset berharga bagi masa depan suatu masyarakat. Oleh karena itu, penurunan IMR menjadi tujuan utama dalam upaya perbaikan sistem perawatan kesehatan dan kondisi sosial-ekonomi suatu wilayah.

Proyeksi IMR Kabupaten Karanganyar untuk tahun 2020 hingga 2045 adalah sangat penting untuk perencanaan kebijakan dan upaya peningkatan kesehatan masyarakat.

Tabel 3.5.
Proyeksi *Infant Mortality Rate* (IMR) Kabupaten Karanganyar
Tahun 2020-2045

No	Periode (tahun)	Proyeksi IMR
1	2025	10,08
2	2030	8,71
3	2035	7,38
4	2040	6,68
5	2045	1,84

Sumber : Perda 4 tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Karanganyar 2025 – 2045,

3.1.6. Usia Perkawinan Pertama Penduduk Tahun 2020-2045

Proyeksi usia perkawinan pertama sebagai salah satu indikator kualitas penduduk menunjukkan tren yang menarik dalam persentase penduduk wanita berumur 10 tahun ke atas yang pernah menikah. Dari tabel yang disajikan, terlihat bahwa terdapat perubahan signifikan dalam pola usia saat menikah dari tahun 2020 hingga 2045.

Pertama, kategori usia di bawah 17 tahun menunjukkan penurunan yang konsisten dalam persentasenya. Pada tahun 2020, persentase wanita yang menikah pada usia ini mencapai 8,73%, dan diproyeksikan akan terus menurun hingga 5,70% pada tahun 2045. Penurunan ini dapat diartikan sebagai dampak positif dari meningkatnya kesadaran akan pendidikan dan kesehatan reproduksi, serta upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam menanggulangi pernikahan anak.

Selanjutnya, untuk kelompok usia 17-18 tahun, terdapat fluktuasi di mana persentasenya sedikit meningkat dari 15,85% pada tahun 2020 menjadi 16,50% pada tahun 2025, namun kemudian mengalami penurunan yang signifikan hingga 10,50% pada tahun 2045. Ini menunjukkan bahwa

meskipun ada momen di mana pernikahan di usia muda tetap bertahan, tren jangka panjang menunjukkan pergeseran menuju usia yang lebih dewasa.

Kelompok usia 19-24 tahun menunjukkan kecenderungan meningkat secara konsisten. Dimulai dari 59,1% pada tahun 2020 dan diproyeksikan mencapai 66,30% pada tahun 2045, kategori ini jelas menjadi pilihan utama bagi wanita di Kabupaten Karanganyar untuk menikah. Hal ini mungkin mencerminkan perubahan sosial yang lebih luas, di mana wanita semakin memilih untuk menyelesaikan pendidikan mereka terlebih dahulu sebelum memasuki jenjang pernikahan, sehingga mereka lebih siap secara emosional dan finansial.

Untuk kategori usia 25 tahun ke atas, persentasenya relatif stabil, dengan sedikit peningkatan dari 16,32% pada tahun 2020 menjadi 17,50% pada tahun 2045. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak wanita yang memilih untuk menikah di usia yang lebih tua, mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai sosial dan preferensi individu terkait pernikahan.

Secara keseluruhan, hal ini mencerminkan perubahan positif dalam pola perkawinan di Kabupaten Karanganyar, di mana semakin banyak wanita memilih untuk menikah di usia yang lebih dewasa. Penurunan pernikahan di usia muda, bersamaan dengan peningkatan pernikahan di usia yang lebih matang, dapat dilihat sebagai indikasi dari kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesadaran sosial. Ini adalah perkembangan yang menggembirakan, karena dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan wanita di masa depan.

Tabel 3.6.
Indikator Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Karanganyar
Tahun 2025-2045 (persen)

Umur Perkawinan Pertama	Persentase Penduduk Wanita Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Karanganyar (Persen)				
	2025	2030	2035	2040	2045
<17	8,50%	7,80%	7,10%	6,40%	5,70%
17-18	16,50%	15,00%	13,50%	12,00%	10,50%
19-24	59,50%	61,20%	62,90%	64,60%	66,30%
25+	15,50%	16,00%	16,50%	17,00%	17,50%
Jumlah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

3.2. Kualitas Penduduk

Penduduk mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan, yaitu sebagai objek maupun subjek. Sebagai objek, artinya kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan, sedangkan sebagai subjek, penduduk adalah pelaku yang akan melaksanakan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, jumlah penduduk akan menjadi modal bagi pembangunan jika penduduk berkualitas (mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kemampuan inovasi) sebaliknya, jika penduduk tidak berkualitas, maka akan menjadi beban dalam pembangunan. Oleh karena itu aspek kualitas penduduk menjadi sangat penting agar penduduk tidak menjadi penghambat pembangunan. Penduduk yang berkualitas dalam arti mempunyai pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kemampuan inovasi, dapat di lihat dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi penduduk. Berdasarkan proyeksi kualitas penduduk Kabupaten Karanganyar, terdapat tren peningkatan kualitas yang signifikan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan hingga tahun 2045.

3.2.1. Pendidikan

Data mengenai indikator kualitas penduduk di Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren positif dalam aspek pendidikan dari tahun 2020 hingga 2045. Pertama, harapan lama sekolah mengalami peningkatan yang konsisten, dimulai dari 13,68 tahun pada tahun 2020 dan diproyeksikan mencapai 15,79 tahun pada tahun 2045. Kenaikan ini mencerminkan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah tersebut, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, angka partisipasi sekolah untuk anak usia 5-6 tahun menunjukkan angka yang sangat tinggi, yakni 98,36% pada tahun 2020, dan diproyeksikan mencapai 100% mulai tahun 2025 hingga 2045. Angka ini menunjukkan keberhasilan program pendidikan dasar dan upaya pemerintah dalam mendorong anak-anak untuk memulai pendidikan mereka

pada usia dini, yang sangat penting untuk fondasi pendidikan yang lebih baik di masa depan.

Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun juga menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Dari 8,56 tahun pada tahun 2020, angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 12,99 tahun pada tahun 2045. Kenaikan ini menunjukkan bahwa penduduk semakin mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, dan mereka lebih lama terlibat dalam proses belajar, yang berdampak positif pada keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, hal ini mencerminkan kemajuan yang signifikan dalam kualitas pendidikan di Kabupaten Karanganyar. Peningkatan harapan lama sekolah, tingginya partisipasi di pendidikan dasar, serta bertambahnya rata-rata lama sekolah menunjukkan adanya usaha yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk melalui pendidikan. Hal ini akan memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan sosial dan ekonomi, serta dapat meningkatkan daya saing sumber daya manusia di masa depan.

Tabel 3.7.
Indikator Pendidikan Penduduk Kabupaten Karanganyar yang diinginkan Pada Tahun 2045

Indikator Kualitas Penduduk	Periode Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
1. Pendidikan					
a. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,95	14,23	14,59	14,96	15,79
b. Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	98,82	100	100	100	100
c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,04	10,53	11,18	11,86	12,99

3.2.2. Kesehatan

Data mengenai indikator kesehatan penduduk Kabupaten Karanganyar menunjukkan harapan yang optimis untuk peningkatan kesehatan masyarakat yang berkelanjutan hingga tahun 2045. Salah satu indikator paling signifikan adalah usia harapan hidup (UHH), yang meningkat dari 77,47 tahun pada tahun 2020 menjadi 84,4 tahun pada tahun 2045. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam akses terhadap

layanan kesehatan, peningkatan gizi, serta perbaikan dalam kualitas hidup secara keseluruhan. Usia harapan hidup yang lebih tinggi menunjukkan bahwa penduduk semakin mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik, serta gaya hidup yang lebih sehat.

Selain itu, data mengenai jumlah kasus kematian ibu menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan. Pada tahun 2020, tercatat 4 kasus kematian ibu, yang diproyeksikan akan turun menjadi 1 kasus pada tahun 2045. Penurunan ini menandakan keberhasilan dalam program kesehatan ibu dan anak, peningkatan akses ke layanan kesehatan reproduksi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan prenatal dan posnatal. Ini merupakan langkah penting dalam upaya mengurangi angka kematian ibu dan meningkatkan kualitas perawatan kesehatan bagi wanita hamil dan melahirkan.

Selanjutnya, indikator prevalensi stunting pada balita juga menunjukkan tren perbaikan yang signifikan. Dari tingkat prevalensi 22,3% pada tahun 2020, diperkirakan akan turun drastis menjadi 5,31% pada tahun 2045. Penurunan prevalensi stunting ini sangat penting karena stunting berhubungan langsung dengan masalah gizi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Usaha untuk mengurangi stunting mencakup peningkatan gizi melalui program makanan sehat, pendidikan gizi bagi orang tua, serta akses yang lebih baik ke layanan kesehatan untuk balita.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan perubahan positif yang signifikan dalam indikator kesehatan penduduk Kabupaten Karanganyar. Peningkatan usia harapan hidup, penurunan kasus kematian ibu, dan berkurangnya prevalensi stunting menunjukkan bahwa upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan selama ini mulai membuahkan hasil yang nyata. Dengan terus melanjutkan program-program kesehatan yang efektif dan memperkuat sistem kesehatan, Kabupaten Karanganyar memiliki potensi untuk mencapai target kesehatan yang lebih baik di masa depan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 3.8.
Indikator Kesehatan Penduduk Kabupaten Karanganyar
yang diinginkan Pada Tahun 2045

Indikator Kualitas Penduduk	Periode Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	78	79,26	80,85	82,48	84,4
2. Jumlah Kasus Kematian Ibu	4	4	3	2	1
3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	13,65	11,99	9,9	7,82	5,31

3.2.3. Ekonomi

Proyeksi indikator ekonomi penduduk Kabupaten Karanganyar menunjukkan tren yang sangat positif menuju tahun 2045. Salah satu indikator yaitu tingkat pengangguran terbuka, yang diproyeksikan menurun dari 5,96% pada tahun 2020 menjadi hanya 1,22% pada tahun 2045. Penurunan signifikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, penciptaan lapangan kerja yang lebih baik, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini diharapkan dapat memberikan stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan peningkatan yang konsisten, dimulai dari 59,88% pada tahun 2025 dan diproyeksikan mencapai 72,43% pada tahun 2045. Peningkatan ini mencerminkan kesadaran yang lebih besar akan pentingnya peran perempuan dalam perekonomian, serta upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung bagi perempuan. Dengan meningkatnya partisipasi perempuan di angkatan kerja, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kontribusi ekonomi secara keseluruhan.

Di sisi lain, angka ketergantungan penduduk menunjukkan tren peningkatan yang perlu diperhatikan, dari 45,32% pada tahun 2020 menjadi 55,11% pada tahun 2045. Peningkatan angka ketergantungan ini dapat menjadi tantangan bagi perekonomian, karena semakin banyak penduduk yang tidak aktif secara ekonomi dibandingkan dengan yang aktif. Hal ini

menuntut perencanaan yang baik dalam pengelolaan sumber daya dan program-program sosial untuk mendukung kelompok rentan.

Sementara itu, indeks pembangunan manusia (IPM) menunjukkan kemajuan yang signifikan, dengan proyeksi meningkat dari 75,86 pada tahun 2020 menjadi 89,45 pada tahun 2045. Peningkatan IPM ini mencerminkan kemajuan dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan, yang semuanya merupakan indikator penting dari kualitas hidup masyarakat.

Tingkat kemiskinan diperkirakan akan menurun drastis dari 10,28% pada tahun 2020 menjadi hanya 0,47% pada tahun 2045. Penurunan tingkat kemiskinan ini menunjukkan keberhasilan dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan ekonomi yang efektif, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan harapan yang optimis untuk perkembangan ekonomi di Kabupaten Karanganyar, dengan penurunan pengangguran, peningkatan partisipasi perempuan, kemajuan dalam indeks pembangunan manusia, dan penurunan signifikan dalam angka kemiskinan, meskipun perlu perhatian terhadap peningkatan angka ketergantungan penduduk yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di masa depan.

Tabel 3.9.
Indikator Ekonomi Penduduk Kabupaten Karanganyar
yang diinginkan Pada Tahun 2045

Indikator Kualitas Penduduk	Periode Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
1. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,07	3,39	2,69	2,14	1,22
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,88	62,28	65,28	68,28	72,43
3. Angka Ketergantungan Penduduk /DR (%)	46,17	47,66	49,17	51,87	55,11
4. Indeks Pembangunan Manusia	78,19	81,53	84,35	87,24	89,45
5. Tingkat Kemiskinan	8,96	8,47	5,87	2,51	0,47

3.3. Persebaran dan Mobilitas penduduk.

Kabupaten Karanganyar secara keseluruhan menunjukkan tren pertumbuhan kepadatan penduduk yang moderat namun konsisten. Proyeksi konservatif menunjukkan peningkatan dari 1265 jiwa/km² pada

tahun 2025 menjadi 1445 jiwa/km² pada tahun 2045, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,70%. Pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan dengan tren historis, yang menunjukkan peningkatan dari 1 132,02 jiwa/km² pada tahun 2018 menjadi 1244 jiwa/km² pada tahun 2023.

Variasi pertumbuhan antar kecamatan cukup signifikan, Kecamatan dengan pertumbuhan tinggi: Jatipuro (0,93%) dan Tasikmadu (0,84%). Kecamatan dengan pertumbuhan rendah: Tawangmangu (0,29%) dan Jenawi (0,41%). Kecamatan padat penduduk dengan pertumbuhan lambat: Colomadu (0,17%) dan Jaten (0,21%).

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan kepadatan penduduk di Kabupaten Karanganyar meliputi: a) Urbanisasi dan pembangunan: Ekspansi daerah perkotaan dan pengembangan infrastruktur menarik lebih banyak orang untuk pindah ke wilayah tersebut; b) Peluang ekonomi: Pertumbuhan industri, terutama industri kecil, dan peningkatan lapangan kerja berkontribusi pada pertumbuhan populasi. Kecamatan Karangpandan, misalnya, memiliki jumlah industri kecil tertinggi; c) Kebijakan pemerintah: Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2013 yakni tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2032 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045 mempengaruhi pola pertumbuhan dan distribusi penduduk.; d) Pertumbuhan alami: Perbedaan antara tingkat kelahiran dan kematian juga berperan dalam pertumbuhan populasi. e) Migrasi: Perpindahan penduduk antar kecamatan dan dari/ke luar kabupaten mempengaruhi distribusi kepadatan penduduk.

Tabel 3.10.
Indikator Kepadatan Penduduk Kabupaten Karanganyar
yang diinginkan Pada Tahun 2045

Wilayah	Proyeksi Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
1. Kabupaten Karanganyar	1265	1310	1355	1400	1445
2. Kecamatan Jatipuro	1050	1100	1150	1200	1250
3. Kecamatan Jatiyoso	605	620	635	650	665
4. Kecamatan Jumapolo	800	830	860	890	920
5. Kecamatan Jumantono	965	1000	1035	1070	1105

Wilayah	Proyeksi Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
6. Kecamatan Matesih	1755	1810	1865	1920	1975
7. Kecamatan Tawangmangu	685	695	705	715	725
8. Kecamatan Ngargoyoso	585	600	615	630	645
9. Kecamatan Karangpandan	1325	1370	1415	1460	1505
10. Kecamatan Karanganyar	2045	2110	2175	2240	2305
11. Kecamatan Tasikmadu	2550	2660	2770	2880	2990
12. Kecamatan Jaten	3330	3365	3400	3435	3470
13. Kecamatan Colomadu	4840	4880	4920	4960	5000
14. Kecamatan Gondangrejo	1615	1675	1735	1795	1855
15. Kecamatan Kebakramat	1800	1830	1860	1890	1920
16. Kecamatan Mojogedang	1370	1420	1470	1520	1570
17. Kecamatan Kerjo	835	860	885	910	935
18. Kecamatan Jenawi	500	510	520	530	540

3.4. Pembangunan Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam suatu negara, sumber kekuatan membangun bangsa dan negara, dan inti serta pondasi bagi perkembangan setiap individu. untuk menjadi negara yang kuat dan sehat harus ditopang oleh generasi yang berkualitas. Mencetak generasi berkualitas harus dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga melalui penerapan delapan fungsi keluarga, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Beberapa indikator penting dalam pembangunan keluarga diantaranya adalah jumlah jiwa dalam keluarga, persentase keluarga Pra Sejahtera, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Angka Perceraian. Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPG yang mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. IPG merupakan ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposisi dari indikator IPM.

Kondisi pembangunan keluarga di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan indikatornya menunjukkan rata-rata angka jumlah jiwa dalam keluarga diharapkan akan stabil atau sedikit menurun, mencerminkan tren global menuju keluarga yang lebih kecil. Hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan kesadaran akan pentingnya kualitas hidup dan pendidikan, di

mana keluarga cenderung memilih untuk memiliki lebih sedikit anak agar dapat memberikan perhatian dan sumber daya yang lebih baik bagi setiap anggota keluarga. Dengan demikian, diharapkan akan ada peningkatan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan anak-anak.

Persentase keluarga prasejahtera diperkirakan akan menurun secara signifikan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program-program sosial dan ekonomi, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, diharapkan dapat mengurangi jumlah keluarga yang berada dalam kategori prasejahtera. Penurunan ini akan mencerminkan kemajuan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Angka perceraian di Kabupaten Karanganyar mungkin akan mengalami perubahan, dengan kemungkinan penurunan jika program-program pendidikan dan konseling keluarga berhasil diterapkan. Masyarakat yang lebih teredukasi dan memiliki akses ke layanan konseling yang baik cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil. Namun, jika tantangan sosial dan ekonomi tetap ada, angka perceraian bisa tetap tinggi, mencerminkan ketidakpuasan dalam hubungan keluarga.

Indeks Pembangunan Gender diharapkan meningkat, mencerminkan kemajuan dalam kesetaraan gender di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Dengan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam angkatan kerja dan mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, IPG yang lebih tinggi akan menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi yang lebih kuat dalam masyarakat. Ini akan berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar.

Secara keseluruhan, proyeksi untuk tahun 2045 menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar berpotensi untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam indikator-indikator sosial dan ekonomi, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, dan kesetaraan gender. Dengan perencanaan yang tepat dan implementasi kebijakan yang efektif, Kabupaten Karanganyar dapat menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Tabel 3.11.
Indikator Pembangunan Keluarga di Kabupaten Karanganyar
yang diinginkan Pada Tahun 2045

No	Indikator	2020	2045
1	Rata-rata angka Jumlah Jiwa Dalam Keluarga	3,73	3,5
2	Persentase Keluarga Prasejahtera	21,9	10
3	Angka Perceraian	72.997	35.000
4	Indeks Pembangunan Gender	92,18	95

3.5. Penataan Administrasi Kependudukan

Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang meletakkan penduduk sebagai fokus, baik sebagai subjek maupun objek, dalam rangka memperluas pilihan untuk mencapai tujuan pembangunan, standar hidup layak, kesehatan prima, serta memiliki pendidikan dan/atau keterampilan, yang berkelanjutan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan disamping aspek kuantitas dan kualitas penduduk, aspek data dan administrasi kependudukan adalah hal yang juga sangat penting, karena dalam perencanaan data dan administrasi ini merupakan pijakan dalam menyusun perencanaan. Oleh karena itu aspek data dan administrasi kependudukan juga perlu dibenahi dan diperhatikan. Adapun indikator-indikator dari capaian yang akan direncanakan dalam aspek administrasi dan data kependudukan yang penting diantaranya adalah persentase penduduk yang punya akta kelahiran, persentase penduduk yang punya KK, persentase penduduk yang punya KTP, dan waktu pelayanan administrasi kependudukan (hari).

Persentase penduduk yang memiliki KTP diproyeksikan mencapai 100%, yang mencerminkan keberhasilan dalam menjangkau seluruh populasi dengan layanan administrasi kependudukan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap individu diakui secara resmi, yang akan mendukung akses mereka terhadap berbagai layanan publik dan program pemerintah. Selain itu, persentase penduduk yang memiliki akta kelahiran juga diharapkan mencapai 100% pada tahun 2045, menggambarkan komitmen untuk memastikan semua anak terdaftar dan memiliki identitas resmi sejak lahir. Pencatatan akta kelahiran yang baik adalah langkah awal

dalam menjamin hak-hak anak dan akses mereka terhadap pendidikan serta layanan kesehatan. Sementara itu, persentase penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) tetap stabil di 100%, menunjukkan bahwa setiap keluarga di Kabupaten Karanganyar telah terdaftar, yang penting untuk perencanaan sosial dan ekonomi. Terakhir, waktu pelayanan administrasi yang konsisten selama 1 hari menunjukkan efisiensi dalam proses administrasi, yang sangat penting untuk memberikan layanan yang cepat dan responsif kepada masyarakat. Keseluruhan data ini menunjukkan bahwa dengan upaya yang berkelanjutan, Kabupaten Karanganyar siap untuk mencapai dan mempertahankan capaian tinggi dalam administrasi kependudukan di tahun 2045, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.12.
Indikator Administrasi Kependudukan Kabupaten Karanganyar yang
Diinginkan Pada Tahun 2045

No	Indikator	2020	2045
1	Penduduk Punya KTP (%)	99.87	100
2	Penduduk Punya akta Kelahiran (%)	93,82	100
3	Penduduk Punya KK (%)	100	100
4	Waktu Pelayanan Administrasi	1 hari	1 hari

BAB IV

VISI, MISI DAN ISU STRATEGIS

4.1. Visi dan Misi GDPK Provinsi Jawa Tengah 2020–2045

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 4 tahun 2023 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2045 dirumuskan sebagai berikut :

**Terwujudnya Penduduk Yang Berkualitas dan Berkarakter
Sebagai Modal Pembangunan Untuk Mencapai Jawa Tengah Yang
Mandiri, Maju, Adil dan Sejahtera.**

Visi tersebut mengandung makna bahwa pembangunan kependudukan ditekankan pada peningkatan kualitas penduduk karena adanya bonus demografi yang akan menjadi modal dasar pembangunan daerah. Sedangkan berkarakter diartikan sebagai penduduk Jawa Tengah diharapkan memiliki karakter yang menggambarkan ciri khas Jawa Tengah.

Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan ke dalam tujuh misi sebagai berikut :

1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan kedalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup.
2. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau.
3. Memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam

maupun daya dukung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial budaya.

4. Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih.
5. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal.
6. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan.
7. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan dalam rangka mencapai "*window of opportunity*".

4.2. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Karanganyar

Penyusunan visi dan misi dalam GDPK Kabupaten Karanganyar mengacu pada Visi dan Misi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Karanganyar berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2045, adalah :

**Karanganyar Life Center of Nusantara 2045 : “Maju,
Kompetitif, dan Harmoni”**

Untuk mencapai Visi tersebut dijabarkan ke dalam empat Misi Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan;
2. Mewujudkan Kehidupan Sosial berkarakter;
3. Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan berdaya saing;
4. Mewujudkan Lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

Berdasarkan misi pembangunan jangka panjang daerah tersebut, misi yang erat kaitannya dengan GDPK Kabupaten Karanganyar adalah misi kedua yaitu : **(2) Mewujudkan kehidupan sosial**

berkarakter. Hal ini sangat berkaitan dengan isu strategis dalam kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan, antara lain : (1) belum optimalnya kualitas sumber daya manusia menghadapi tantangan perubahan global, revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0; (2) masalah kemiskinan, tingkat pengangguran dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat; (3) serta belum optimalnya pemanfaatan dari bonus demografi yang telah dialami oleh Kabupaten Karanganyar (tahun 2023 angka ketergantungan sebesar 59,10) dan akan meningkat di tahun mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Karanganyar telah mengalami bonus demografi yang sangat memerlukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

4.3. Visi dan Misi GDPK Kabupaten Karanganyar

Dengan memperhatikan Visi dan Misi GDPK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2045 berdasarkan Pergub Nomor 4 tahun 2023 dan Perda Nomor 4 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Karanganyar (RPJPD) Tahun 2025–2045 maka dirumuskan Visi GDPK sebagai berikut :

**Terwujudnya Pembangunan Kependudukan Guna Mencapai
Karanganyar Maju dan Kompetitif dan Harmoni.**

Kebijakan pembangunan kependudukan adalah

Berdasarkan phrase visi pembangunan berwawasan kependudukan erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan sebagai kebijakan pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan yang ideal antara pembangunan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta daya tampung lingkungan sosial sehingga segenap potensi sumber daya dapat dioptimalkan dalam meningkatkan kesejahteraan. Adapun phrase dalam visi adalah sebagai berikut :

No	Phrase	Kaitan Pembangunan Kependudukan
1	Maju	Kemajuan dimaknai sebagai terwujudnya pembangunan kependudukan Kabupaten Karanganyar, agar seluruh penduduk dapat terpenuhi kebutuhan pokok, papan, kesehatan dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Tata kehidupan sosial masyarakat yang maju dicerminkan dengan tertib dan menaati hukum dan hak asasi manusia serta kesetaraan gender.
2	Kompetitif	Sumber daya manusia kompetitif adalah memiliki pendidikan yang baik, kecakapan <i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i> memiliki daya saing di pasar kerja industri, sehat, sejahtera, serta terampil dan inovatif.
3	Harmoni	Menunjukkan pola kehidupan yang bahagia sesuai dengan indeks kebahagiaan (berdasarkan aspek kepuasan hidup, peran dan makna hidup). Terpenuhinya kehidupan aman dan nyaman berdasarkan keseimbangan kualitas lingkungan hidup, daya tampung dengan sikap yang toleran, bergotong royong.

Untuk mewujudkan visi pembangunan kependudukan dirumuskan lima (5) misi GDPK sebagai berikut :

1. Mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk dengan pertumbuhan seimbang;
2. Meningkatkan kualitas penduduk dengan kesehatan dan pendidikan yang tinggi dan sejahtera;
3. Mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. Meningkatkan penataan persebaran penduduk yang dinamis;
5. Meningkatkan penataan sistem administrasi kependudukan dan pemanfaatan basis data secara terpadu.

4.4. Tujuan Pembangunan GDPK

Pembangunan berwawasan kependudukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia di Kabupaten Karanganyar yang sehat, bertakwa, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja yang tinggi.
3. Mewujudkan keluarga sejahtera, berketahanan dan harmonis.
4. Mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta gotong royong.
5. Penataan basis data dengan SIAK dan pelayanan berbasis teknologi informatika (identitas kependudukan digital).

4.5. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada gambaran kinerja pembangunan kependudukan Kabupaten Karanganyar dapat dikemukakan isu strategis pembangunan kependudukan di Kabupaten Karanganyar, sebagai berikut :

1. Pengelolaan kuantitas penduduk belum optimal terutama dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Program KB).
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama kualitas kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan. Peningkatan kualitas tenaga kerja terutama kelompok usia produktif (15–64 tahun) berpendidikan rendah sehingga belum dapat bersaing di pasar kerja dunia industri dan jasa-jasa, masalah penduduk miskin dan pengangguran yang berdampak pada kesejahteraan dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan angka ketergantungan diketahui Kabupaten Karanganyar telah memasuki “bonus demografi” dengan angka ketergantungan (2023) sebesar 45,74 dengan kata lain setiap 100 orang usia produktif menanggung sebanyak 46 orang tidak

produktif. Perlu dukungan kebijakan pembangunan kualitas sumber daya manusia agar bonus demografi dapat secara optimal meningkatkan kualitas tenaga kerja usia produktif di Kabupaten Karanganyar.

3. Persebaran penduduk belum merata dengan kepadatan rata-rata (2023) sebesar 1.244 jiwa per kilometer², namun penduduk terkonsentrasi di pusat-pusat kegiatan perekonomian daerah terutama di Kecamatan Colomadu (4.822 jiwa), Karanganyar (2.017 jiwa) dan Jaten (3.315 jiwa) per Km². Hal ini mengakibatkan pemukiman padat penduduk, kawasan kumuh dan menurunnya daya dukung lingkungan (ketersediaan lahan, air bersih dan rumah tidak layak huni). Kepadatan penduduk di kawasan tertentu berdampak pada kriminalitas, risiko bencana dan masalah sosial lainnya. Mobilitas penduduk yang semakin dinamis telah mengakibatkan cukup besarnya generasi muda berurbanisasi ke kota-kota besar di Pulau Jawa dan Luar Jawa karena terbatasnya lapangan pekerjaan.
4. Belum optimalnya fasilitasi dan pembangunan keluarga yang harmonis, permasalahan terkait dengan kelengkapan administrasi perkawinan yang syah, perkawinan anak dan angka perceraian (tahun 2023) sebesar 923 orang dari lebih kurang 8.000 perkawinan dan meningkatkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
5. Belum optimalnya penataan dan kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara lengkap, terutama akta kelahiran, pelaporan perubahan kependudukan, akta perkawinan dan akta kematian. Tertib adminduk dan capil sebagai wujud dari pelayanan administrasi sepanjang hayat dan legalitas kewarganegaraan. Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya sesuai dengan standar .

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN KARANGNYAR

Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025–2045 berdasarkan Perpres Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Kependudukan Nasional, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara nasional sebagai berikut :

1. Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan pelaksanaan pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas;
2. Mewujudkan manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja yang tinggi
3. Mewujudkan keluarga kecil yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni;
4. Keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
5. Mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tertib, akurat dan dapat dipercaya.

Dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kependudukan berdasarkan lima pilar secara terintegrasi baik kebijakan nasional maupun kebijakan di kabupaten/kota secara terpadu. Maka dikemukakan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

5.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengendalian kuantitas penduduk dilaksanakan melalui kebijakan kependudukan strategis yaitu pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

1. Pengaturan Fertilitas

Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) untuk mengatur usia ideal perkawinan

dan jumlah anak yang dilahirkan serta pelayanan KB berkelanjutan. Kebijakan dilaksanakan melalui program KB yang dilaksanakan guna membantu Pasangan Suami Istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengaturan kehamilan yang diinginkan;
- b. Penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu;
- c. Peningkatan akses dan kualitas layanan;
- d. Peningkatan kesertaan KB pria, serta
- e. Promosi pemanfaatan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

Disamping itu, peningkatan Program KB dilaksanakan pula dengan kebijakan :

- a. Peningkatan akses dan layanan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta pelayanan kontrasepsi mantab.
- b. Pelayanan KB tidak dengan pemaksaan dan sesuai norma agama, kesehatan dan budaya lokal.
- c. Peningkatan jangkauan layanan kontrasepsi bagi seluruh penduduk, termasuk kelompok masyarakat miskin dan rentan.

2. Penurunan Mortalitas

Penurunan angka kematian adalah dalam rangka meningkatkan usia harapan hidup dan sehat diprioritaskan pada upaya :

- a. Penurunan angka kematian ibu.
- b. Penurunan angka kematian bayi dan anak.
- c. Penurunan angka kematian akibat kecelakaan dan bencana.

Upaya penurunan angka kematian dilaksanakan melalui upaya proaktif, preventif, kuartif dan rehabilitatif melalui kerjasama pemerintah daerah dengan partisipasi masyarakat.

3. Strategi Pengendalian Kuantitas Penduduk

Untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang dan pengendalian angka kelahiran dan menurunkan angka mortalitas, diperlukan strategi :

- a. Peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.
- b. Memperkuat kelembagaan pelaksanaan Program KB, penguatan sumber daya manusia pelayanan kesehatan dan KB, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.
- c. Melaksanakan kemitraan dan kerjasama strategis antara perangkat daerah, swasta dan partisipasi masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat serta lembaga internasional.
- d. Meningkatkan pelaksanaan Program KB mengarahkan peningkatan layanan kepada kelompok miskin dan rentan.

5.2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesehatan agar penduduk berumur panjang dan sehat, dengan menurunkan angka kematian dan meningkatkan usia harapan hidup (UHH) dan tingkat kesejahteraan yang baik dan akses terhadap pelayanan jaminan sosial.

- a. Peningkatan kesehatan penduduk.
- b. Peningkatan Pendidikan dan Kecakapan Hidup (*life skills*).
- c. Peningkatan Kesejahteraan Penduduk.

Peningkatan kualitas penduduk dilaksanakan dengan strategi kebijakan :

- a. Meningkatkan jangkauan pelayanan dasar kesehatan, peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui Program KIE yang lebih mengarahkan pada Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), edukasi tentang Gizi, Konsumsi Pangan secara Sehat.
- b. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Karanganyar dengan Program Wajib belajar 12 Tahun.
- c. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan non formal dan kecamatan hidup agar penduduk usia produktif memiliki keterampilan.

- d. Membangun kemitraan dan kerjasama strategis bagi peningkatan pendidikan non formal dan kecakapan hidup (*life skills*) bagi membangun kewirausahaan dalam masyarakat.
- e. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil serta pembinaan usaha masyarakat di lapangan pekerjaan sektor informal.
- f. Pendidikan dan pengembangan kewirausahaan bagi kelompok penduduk usia produktif (usia 15–64 tahun) dan kelompok lanjut usia agar aktif dan mandiri.

5.3. Pembangunan Keluarga

Arah kebijakan pembangunan keluarga diarahkan pada kebijakan pembangunan, terutama pada :

- a. Membentuk keluarga yang bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- b. Keluarga berdasarkan ikatan perkawinan yang syah.
- c. Membentuk keluarga yang harmonis, sehat, sejahtera dan mandiri.

Strategi Pembangunan Keluarga diarahkan pada :

- a. Membangun keluarga yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang syah.
- c. Membangun keluarga harmonis, sejahtera sehat dan mandiri baik bagi keluarga, membangun toleransi dan kehidupan masyarakat yang bergotong royong.
- d. Membangun keluarga yang mampu merencanakan peningkatan sumberdaya keluarga.

5.4. Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

- a. Pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan.
- b. Pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan daerah secara berkelanjutan.

- c. Pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan pembangunan sesuai dengan kebutuhan wilayah.
- d. Pemberian perlindungan kepada TKI yang bekerja di Luar negeri.

Strategi dalam rangka mencapai kebijakan bagi pengarahan mobilitas penduduk sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan kondusivitas daerah bagi mobilitas penduduk secara aman dan mewujudkan layanan transportasi umum.
- b. Meningkatkan layanan kepada pendatang dan penanganan penduduk yang mengalami bencana.
- c. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru sesuai dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan sosial dan perekonomian daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- d. Meningkatkan pelayanan terpadu perijinan bagi calon Pekerja Migran yang akan bekerja di luar negeri secara formal dan melengkapi dengan sertifikasi keahlian/kecakapan.

5.5. Penataan Administrasi Kependudukan dan Layanan Berbasis Teknologi Informatika (TI)

Meningkatkan pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagai wujud pelayanan administrasi sepanjang hayat dan perwujudan hak asasi manusia.

- a. Pengembangan basis data kependudukan dan pencatatan sipil bagi terwujudnya pelayanan dasar bagi warga negara.
- b. Penataan dan penerbitan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil secara lengkap.

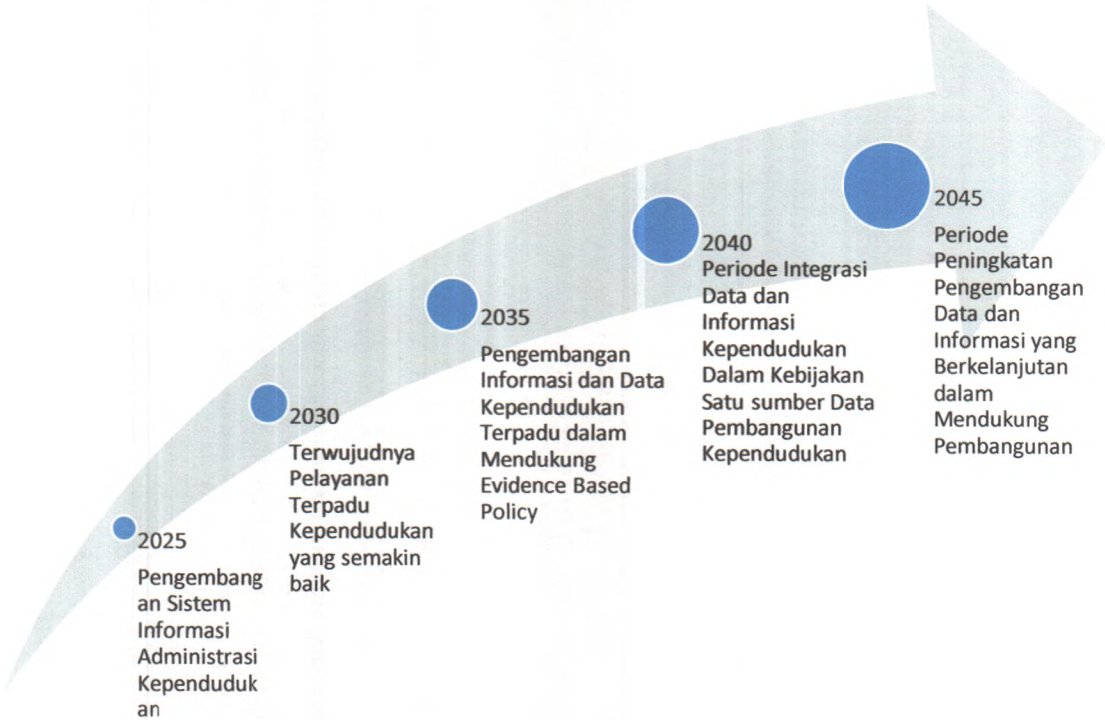
Strategi Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- a. Pemantapan pelayanan SIAK dan Capil bagi semua penduduk.
- b. Pelayanan sistem data kependudukan bagi seluruh instansi pemerintah dalam mewujudkan pelayanan dasar bagi penduduk dan pemanfaatan data kependudukan bagi kepentingan nasional (pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial, ketahanan nasional, perpajakan, pemilihan umum dan lainnya).

- c. Pelayanan adminduk berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara menyeluruh dan bermanfaat bagi pengembangan pelayanan sosial.

untuk mendukung *Evidence Based Policy* yang merujuk pada upaya sistematis untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data tentang populasi dan karakteristik demografinya secara menyeluruh. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan terkini yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan publik..

Pada tahun 2040, periode integrasi data dan informasi kependudukan akan menjadi fokus, dengan tujuan menciptakan kebijakan satu sumber data pembangunan kependudukan. Ini akan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik dan mengurangi tumpang tindih data. Pada tahun 2045, diharapkan akan tercapai peningkatan pengembangan data dan informasi yang berkelanjutan, yang akan mendukung pembangunan secara keseluruhan. Dengan langkah-langkah ini, roadmap ini bertujuan untuk menciptakan sistem informasi kependudukan yang komprehensif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan.



Gambar 6.5.
Pokok-Pokok Roadmap Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

Adapun program yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan khususnya Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan di Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

A. Program Modernisasi Sistem Adminduk

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Digital
 - Implementasi sistem adminduk terintegrasi
 - Pengembangan aplikasi mobile adminduk
 - Digitalisasi arsip kependudukan
 - Pengembangan sistem *backup* dan *recovery*
2. Kegiatan Infrastruktur Teknologi
 - Pembangunan data center adminduk
 - Pengadaan perangkat pendukung digital
 - Pengembangan jaringan terintegrasi
 - Sistem keamanan data
3. Kegiatan Standarisasi Layanan
 - Penyusunan SOP digital
 - Pengembangan sistem monitoring layanan
 - Standardisasi format dokumen
 - Sertifikasi sistem manajemen mutu

B. Program Jemput Bola Adminduk

1. Kegiatan Pelayanan Keliling
 - Mobil keliling adminduk
 - Pelayanan adminduk terpadu
 - Program desa beridentitas
 - Layanan khusus kelompok rentan
2. Kegiatan Kemitraan Pelayanan
 - Kerjasama dengan rumah sakit
 - Kemitraan dengan lembaga pendidikan
 - Koordinasi dengan kantor desa
 - Integrasi dengan layanan sosial
3. Kegiatan Pendampingan Masyarakat
 - Pembentukan kader adminduk desa

- Pendampingan kelompok rentan
- Fasilitasi pengurusan dokumen
- Program desa sadar adminduk

C. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan

1. Kegiatan Pengembangan SDM
 - Pelatihan petugas adminduk
 - Sertifikasi kompetensi pelayanan
 - Pengembangan karir berbasis kinerja
 - Program magang dan pertukaran
2. Kegiatan Penguatan Organisasi
 - Restrukturisasi organisasi
 - Pengembangan sistem kerja digital
 - Modernisasi sarana prasarana
 - Penguatan sistem pengawasan
3. Kegiatan Inovasi Pelayanan
 - Pengembangan *one-stop service*
 - Implementasi sistem antrean digital
 - Pelayanan berbasis *artificial intelligence*
 - Program pelayanan premium

D. Program Integrasi Data Kependudukan

1. Kegiatan Pemutakhiran Data
 - *Cleansing database* kependudukan
 - Validasi data lapangan
 - *Updating data real-time*
 - Sinkronisasi data pusat-daerah
2. Kegiatan *Interoperabilitas* Sistem
 - Integrasi dengan sistem kesehatan
 - Integrasi dengan sistem pendidikan
 - Integrasi dengan sistem sosial
 - Pengembangan *API services*
3. Kegiatan Pemanfaatan Big Data
 - Analisis pola kependudukan
 - Pengembangan *dashboard* eksekutif

- Sistem peringatan dini
- Perencanaan berbasis data

E. Program Edukasi Dan Sosialisasi

1. Kegiatan Kampanye Publik
 - Sosialisasi regulasi adminduk
 - Program edukasi sekolah
 - *Media campaign*
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - Forum peduli adminduk
 - Kelompok sadar adminduk
 - Program duta adminduk
 - Kompetisi desa tertib adminduk

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Karanganyar 2025–2045 merupakan dokumen perencanaan strategis dalam pembangunan jangka panjang yang mengarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu kebijakan pembangunan terencana untuk mewujudkan perbandingan ideal antara perkembangan penduduk dengan daya tampung, memenuhi kebutuhan generasi mendatang. Dalam upaya mencapai Visi Jangka Panjang 2045 adalah mencapai Generasi Indonesia Emas Pada Tahun 2045 yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang berpendidikan, sehat dan berakhlak mulia dengan bersendikan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera di perkotaan maupun perdesaan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Kependudukan Nasional dan Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2023 tentang Grand Design Kependudukan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020–2045. Perwujudan dari grand design pembangunan kependudukan dilaksanakan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga yang berketahanan dan berkualitas melalui pendekatan sebagai berikut :

1. Pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian;
2. Pengembangan kualitas penduduk;
3. Pembangunan keluarga;
4. Pengarahan tentang persebaran dan mobilitas penduduk;
5. Penataan basis data (database) kependudukan dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Karanganyar.

Pelaksanaan pembangunan kependudukan dan SIM Kependudukan dan Capil semakin baik dan dapat dimanfaatkan para pihak dalam pembangunan nasional dan pembangunan daerah, terutama pelayanan dasar yang terdiri dari Pendidikan penduduk, pelayanan dan data kesehatan, data sosial dan bantuan bagi penduduk miskin. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan data untuk pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pilkades di desa serta pembayaran pajak bagi wajib pajak.

Dalam GDPK Kabupaten Karanganyar dikemukakan analisis kondisi dan permasalahan kependudukan, visi dan misi pembangunan kependudukan, dan roadmap pembangunan kependudukan yang terbagi periode lima tahunan. Dalam implementasinya, pokok-pokok pembangunan kependudukan, dan roadmap pembangunan kependudukan yang tercantum dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karanganyar perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar dengan memperhatikan visi dan misi Bupati/ Wakil Bupati terpilih;
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
3. Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD); dan
4. Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karanganyar.

Untuk memastikan pengintegrasian dan pelaksanaan Grand Design Perkembangan Kependudukan (GDPK), perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Karanganyar dengan melibatkan perangkat daerah sesuai dengan urusan kewenangan meliputi pengampu urusan kewenangan kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial serta instansi vertikal yang memiliki kewenangan tentang pengaturan perkawinan, akta perkawinan dan perceraian serta lembaga keagamaan yang membina dalam meningkatkan

- c. Pelayanan adminduk berbasis Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara menyeluruh dan bermanfaat bagi pengembangan pelayanan sosial.

BAB VI

ROADMAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pembangunan kependudukan di Kabupaten Karanganyar memegang peranan penting dalam mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) di daerah ini menjadi landasan strategis untuk mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia secara optimal. Penyusunan roadmap GDPK bertujuan untuk menyusun langkah-langkah konkret dalam pengembangan kependudukan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Karanganyar.

Proses penyusunan roadmap ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta, dengan tujuan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif ini diharapkan dapat menghadirkan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan demografi yang dihadapi oleh Kabupaten Karanganyar, seperti pergeseran penduduk, urbanisasi, serta peningkatan angka kelahiran.

Selain itu, GDPK akan mengintegrasikan isu-isu lintas sektoral, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lingkungan, untuk menciptakan sinergi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan penyusunan roadmap ini, diharapkan pengelolaan kependudukan di Kabupaten Karanganyar dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kualitas hidup masyarakat.

6.1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Perlunya roadmap pengendalian penduduk di Kabupaten Karanganyar sangat penting mengingat tantangan demografis yang dihadapi oleh daerah ini. Pertumbuhan penduduk yang cepat dapat menyebabkan

tekanan pada sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan publik, yang pada akhirnya dapat menghambat pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan adanya roadmap yang jelas, pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang tepat untuk mengendalikan jumlah penduduk secara efektif sesuai karakteristik dan kebutuhan lokal.

Selain itu, roadmap ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi, yang merupakan kunci dalam mencapai keseimbangan demografis. Melalui pengendalian yang terencana, Kabupaten Karanganyar dapat mengurangi angka kelahiran tidak terencana, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan bahwa pertumbuhan penduduk sejalan dengan kapasitas daerah dalam menyediakan layanan dan infrastruktur.

Roadmap pengendalian kuantitas penduduk yang direncanakan untuk periode 2025 hingga 2045 menunjukkan komitmen yang jelas untuk mencapai keseimbangan dalam pertumbuhan penduduk. Sesuai dengan misi pembangunan kependudukan yang telah direncanakan yaitu mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk dengan pertumbuhan seimbang. Maka upaya yang dapat dilakukan sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat pada tahapan sebagai berikut.

Pada tahun 2025, fokus utama adalah mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, yang merupakan langkah awal penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan penduduk tidak melampaui kapasitas sumber daya yang tersedia. Memasuki tahun 2030, targetnya adalah mencapai jumlah penduduk dengan kuantitas konstan yang cenderung menurun, menandakan bahwa upaya pengendalian telah mulai membuahkan hasil dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian angka kelahiran semakin meningkat.

Pada tahun 2035, roadmap ini bertujuan untuk mencapai kondisi kependudukan yang stasioner, di mana pertumbuhan penduduk seimbang, menandakan bahwa angka kelahiran dan kematian berada pada level yang seimbang. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan dapat mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, pada tahun 2040, fokus untuk mencapai kondisi penduduk

yang tumbuh seimbang sebagai syarat untuk mencapai kondisi penduduk tanpa pertumbuhan. Ini menunjukkan bahwa penyesuaian kebijakan dan program-program terkait telah mulai efektif dalam mengendalikan pertumbuhan.

Pada tahun 2045, diharapkan dapat tercapai kondisi Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP), yang mencerminkan keberhasilan dalam pengendalian kuantitas penduduk secara keseluruhan. Dengan pencapaian ini, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera, dengan kualitas hidup yang lebih baik dan lingkungan yang lebih berkelanjutan, serta mendorong pengembangan sosial dan ekonomi yang lebih efektif.



Gambar 6.1.
Pokok-Pokok Roadmap Pengendalian Kuantitas Penduduk
Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

Adapun program yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan khususnya pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

A. Program Penguatan Sistem KB Nasional

1. Kegiatan Revitalisasi Layanan KB

- Peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas layanan KB

- Pengembangan sistem rujukan KB terintegrasi
 - Penguatan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi
 - Pelatihan tenaga kesehatan dalam pelayanan KB berkualitas
2. Kegiatan Penguatan Kapasitas SDM KB
- Rekrutmen dan pelatihan Penyuluh KB baru
 - Peningkatan kapasitas Penyuluh KB existing
 - Penguatan kader KB desa
3. Kegiatan Sistem Informasi KB Terintegrasi
- Integrasi sistem informasi KB dengan sistem kesehatan nasional
 - Implementasi sistem monitoring real-time capaian program
 - Pengembangan aplikasi mobile KB untuk masyarakat

B. Program Edukasi Dan Advokasi KB

1. Kegiatan Komunikasi Perubahan Perilaku
- Kampanye KB multi-platform
 - Edukasi KB berbasis komunitas
 - Program KB goes to campus
 - Pengembangan konten digital KB kreatif
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- Pembentukan kelompok KB mandiri
 - Pengembangan champion KB di tingkat masyarakat
 - Pemberdayaan tokoh agama dan tokoh masyarakat
 - Program ketahanan keluarga berbasis masyarakat
3. Kegiatan Advokasi Kebijakan
- Penguatan regulasi KB di tingkat daerah
 - Pengembangan insentif dan disinsentif KB
 - Sinkronisasi kebijakan pusat-daerah
 - Penguatan komitmen pemangku kepentingan

C. Program Inovasi Dan Pengembangan KB

1. Kegiatan Riset dan Pengembangan
- Penelitian metode kontrasepsi baru
 - Studi efektivitas program KB
 - Kajian dampak program KB terhadap pembangunan

2. Kegiatan Modernisasi Layanan KB
 - Pengembangan layanan KB digital
 - Implementasi telemedicine KB
 - Inovasi metode konseling KB
3. Kegiatan Kemitraan Strategis
 - Kerjasama dengan sektor swasta
 - Pengembangan PPP dalam layanan KB
 - Kolaborasi internasional program KB
 - Penguatan jejaring mitra pembangunan

D. Program Keberlanjutan KB

1. Kegiatan Penguatan Sistem
 - Penguatan mekanisme pembiayaan KB
 - Pengembangan sistem monitoring dampak jangka panjang
 - Peningkatan integrasi program KB dengan SDGs
2. Kegiatan Adaptasi Program
 - Penyesuaian program sesuai perubahan demografi
 - Pengembangan intervensi berbasis wilayah
 - Inovasi program untuk generasi milenial
 - Penguatan ketahanan program

6.2. Peningkatan Kualitas Hidup

Pengembangan kuantitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi mencapai kesejahteraan penduduk.

Mengacu pada amanat dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, peningkatan kualitas keluarga merupakan bagian dari pemenuhan hak penduduk berkaitan dengan memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan

kualitas hidupnya. Serta misi pembangunan kependudukan yaitu mewujudkan pengendalian kuantitas penduduk dengan pertumbuhan seimbang.

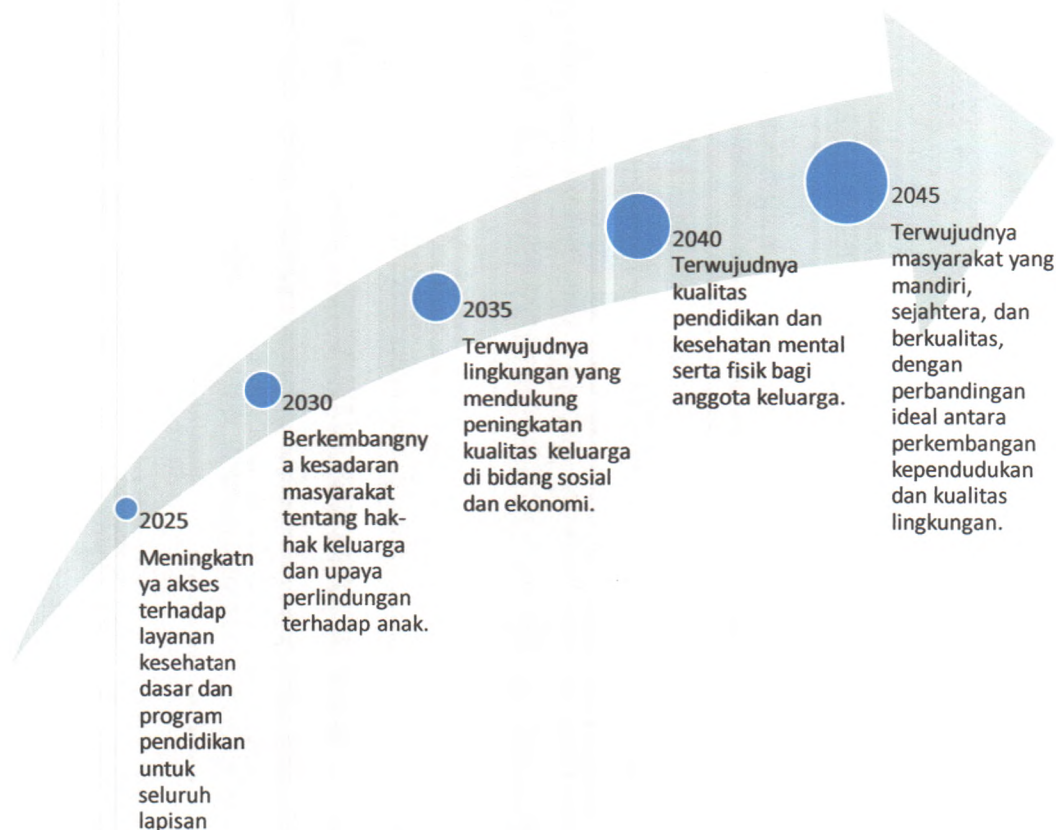
Maka untuk mendukung peningkatan kualitas penduduk, maka setiap penduduk wajib membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi, dan mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Roadmap pengendalian kuantitas penduduk yang dirumuskan untuk periode 2025 hingga 2045 menunjukkan komitmen yang jelas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2025, penekanan akan diberikan pada peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dasar dan program pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, yang merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-hak dasarnya. Selanjutnya, pada tahun 2030, diharapkan terjadi perkembangan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak keluarga dan perlunya perlindungan terhadap anak, untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi pertumbuhan generasi muda.

Memasuki tahun 2035, fokus pada penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan kualitas keluarga di bidang sosial dan ekonomi, yang mencakup keberdayaan masyarakat dan penguatan jaringan sosial. Pada tahun 2040, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan mental serta fisik bagi anggota keluarga menjadi prioritas, sehingga setiap individu dapat berkembang secara optimal baik secara intelektual maupun emosional. Pada tahun 2045, roadmap ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkualitas, dengan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian kuantitas penduduk tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada pencapaian kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)

Kabupaten Karanganyar ◀◀◀◀



Gambar 6.2.

Pokok-Pokok Roadmap Peningkatan Kualitas Penduduk Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

Adapun program yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan khususnya peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

A. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan

1. Kegiatan Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar
 - Revitalisasi Puskesmas dan jaringannya
 - Pengembangan sistem rujukan terintegrasi
 - Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
 - Pengembangan sistem kesehatan berbasis keluarga
2. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Penguatan surveilans kesehatan
 - Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular
 - Penanganan stunting dan malnutrisi
 - Pengembangan sistem deteksi dini penyakit

3. Kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah

- Perluasan cakupan BPJS Kesehatan
- Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan daerah
- Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan
- Program kesehatan untuk kelompok rentan

B. Program Peningkatan Kualitas Pendidikan

1. Kegiatan Pemerataan Akses Pendidikan

- Pembangunan dan rehabilitasi sekolah
- Program beasiswa daerah
- Pengembangan pendidikan inklusif
- Transportasi sekolah gratis untuk daerah terpencil

2. Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan

- Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan daerah
- Pelatihan dan sertifikasi guru
- Modernisasi sarana pembelajaran
- Program literasi digital

3. Kegiatan Pendidikan Vokasi dan Keterampilan

- Pengembangan SMK unggulan
- Kerjasama dengan industri untuk pemagangan
- Pelatihan keterampilan berbasis komunitas
- Program sertifikasi kompetensi

C. Program Pengembangan Ketenagakerjaan

1. Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

- Pelatihan kerja berbasis kompetensi
- Program pemagangan industri
- Sertifikasi profesi
- Pengembangan inkubator wirausaha

2. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja

- Pengembangan sentra industri kecil menengah
- Program kewirausahaan pemuda
- Pemberdayaan UMKM
- Job matching dan bursa kerja daerah

3. Kegiatan Perlindungan Tenaga Kerja

- Penguatan pengawasan ketenagakerjaan
- Program jaminan sosial tenaga kerja
- Penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- Perlindungan pekerja sektor informal

6.3. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga sebagai sendi dasar dalam pembangunan nasional. Pembangunan keluarga bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan harmonis dan keluarga sejahtera. Dasar pemikiran yang menjadi dasar dalam kebijakan pembangunan keluarga secara nasional meliputi 1. Membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 2. Membangun iklim berkeluarga berdasarkan pada perkawinan yang sah; 3. Membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri; 4. Membangun keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; 5. Membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga. Kebijakan nasional tersebut sejalan dengan misi pembangunan keluarga yang direncanakan yaitu mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun rincian per periode roadmap pembangunan keluarga yang akan dilakukan di Kabupaten Karanganyar untuk periode 2025 hingga 2045 menunjukkan langkah-langkah strategis dalam menciptakan keluarga yang berkualitas dan berdaya saing. Pada tahun 2025, fokus utama adalah membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadi fondasi moral dan spiritual bagi setiap anggota keluarga. Hal ini penting untuk membentuk karakter dan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pada tahun 2030, fokus pada upaya menciptakan iklim berkeluarga yang sehat dengan memperkuat institusi perkawinan yang sah. Hal ini mencakup edukasi tentang hak dan tanggung jawab dalam keluarga, yang diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dan meningkatkan stabilitas keluarga.

Memasuki tahun 2035, roadmap ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan mandiri. Dalam tahap ini, program pemberdayaan ekonomi dan kesehatan keluarga akan diimplementasikan untuk memastikan setiap anggota keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pada tahun 2040, fokus pada pembangunan keluarga yang berwawasan nasional, di mana keluarga diharapkan dapat berkontribusi aktif dalam masyarakat dan menjaga nilai-nilai kebangsaan. Pada tahun 2045, tujuan akhir adalah terwujudnya keluarga yang mampu merencanakan dan mengelola sumber daya dengan baik, sehingga setiap keluarga dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi serta mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan keluarga dapat berjalan secara holistik dan berkelanjutan, memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 6.3.
Pokok-Pokok Roadmap Pembangunan Keluarga
Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

Adapun program yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan khususnya Pembangunan Keluarga di Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

A. Program Penguatan Administrasi Perkawinan

1. Kegiatan Modernisasi Layanan Administrasi Perkawinan
 - Pengembangan sistem informasi perkawinan terintegrasi
 - Digitalisasi pencatatan perkawinan
 - Layanan administrasi perkawinan online
 - Pembentukan unit layanan terpadu
2. Kegiatan Penguatan Kapasitas Petugas
 - Pelatihan petugas pencatat nikah
 - Standardisasi pelayanan KUA
 - Peningkatan kompetensi penghulu
 - Pengembangan sistem monitoring kinerja
3. Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi
 - Kampanye pentingnya pencatatan perkawinan
 - Penyuluhan hukum perkawinan
 - Edukasi berbasis komunitas
 - Program jemput bola pencatatan nikah

B. Program Pencegahan Perkawinan Anak

1. Kegiatan Penguatan Regulasi
 - Penyusunan Perda pencegahan perkawinan anak
 - Pembentukan gugus tugas pencegahan perkawinan anak
 - Pengembangan sistem pelaporan dan pencegahan
 - Koordinasi lintas sektor
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - Pembentukan forum peduli anak
 - Pendampingan keluarga berisiko
 - Pemberdayaan tokoh agama dan masyarakat
 - Program pendidikan *life skills* remaja
3. Kegiatan Pendidikan dan Advokasi
 - Program pendidikan kesehatan reproduksi
 - Kampanye bahaya pernikahan anak

- Pembentukan kelompok remaja peduli
- Advokasi kebijakan berbasis sekolah

C. Program Ketahanan Keluarga

1. Kegiatan Pendidikan Pranikah
 - Kursus calon pengantin wajib
 - Bimbingan pranikah berbasis agama
 - Pelatihan manajemen keluarga
 - Program persiapan kehidupan berkeluarga
2. Kegiatan Konseling Keluarga
 - Pengembangan pusat konseling keluarga
 - Pelatihan konselor keluarga
 - Layanan konsultasi online
 - Program pendampingan keluarga bermasalah
3. Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
 - Pelatihan kewirausahaan keluarga
 - Program kemitraan UMKM
 - Pengembangan kelompok usaha keluarga
 - Fasilitasi akses permodalan

D. Program Pencegahan Perceraian

1. Kegiatan Mediasi dan Konsiliasi
 - Penguatan peran BP4
 - Pelatihan mediator perceraian
 - Pengembangan sistem mediasi terpadu
 - Program pendampingan pasca mediasi
2. Kegiatan Penguatan Kelembagaan
 - Revitalisasi lembaga konsultasi perkawinan
 - Pengembangan pusat mediasi terpadu
 - Peningkatan kapasitas pengadilan agama
 - Koordinasi lintas lembaga
3. Kegiatan Pendampingan Pasca Perceraian
 - Program konseling pasca cerai
 - Pemberdayaan ekonomi keluarga *single parent*
 - Pendampingan psikologis anak

- Pembentukan komunitas dukungan

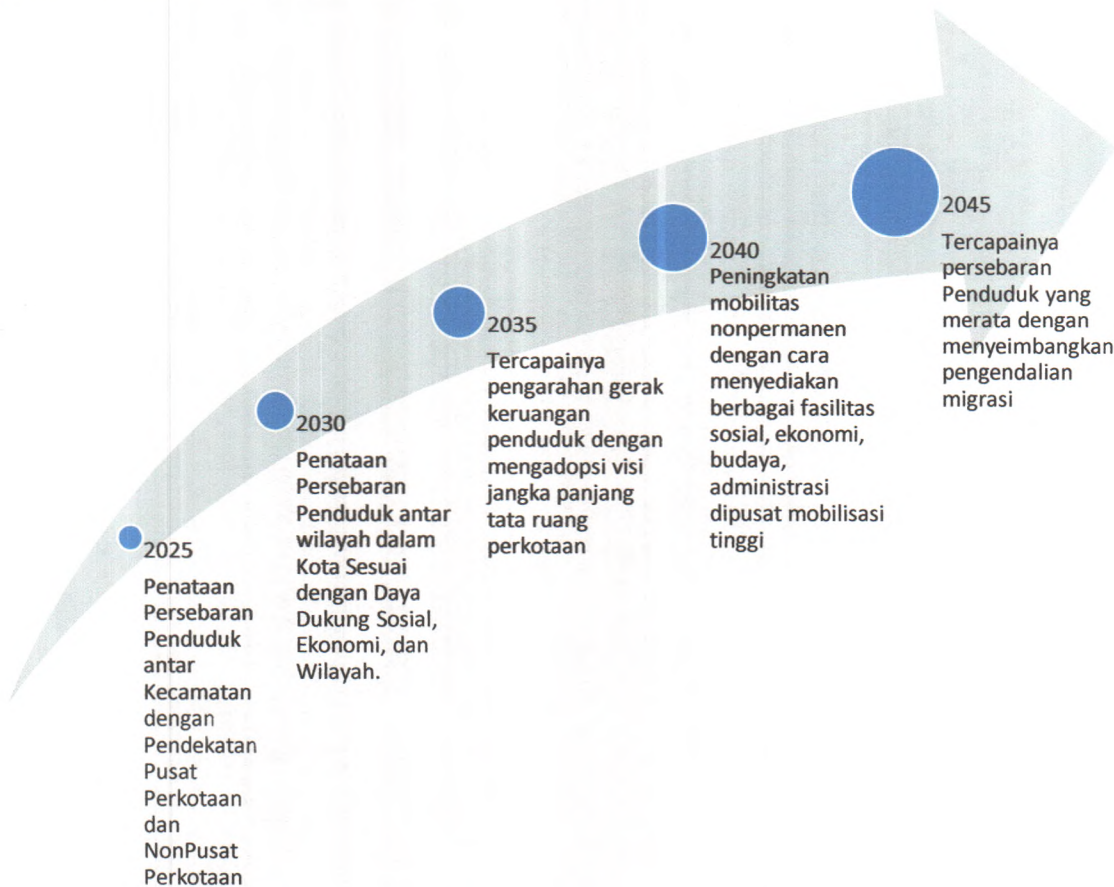
6.4. Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk memiliki keterkaitan dengan persebaran penduduk di suatu wilayah. Pengarahan mobilitas penduduk pada dasarnya bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan sebagaimana amanat Undang-Undang No. 52 Tahun 2009. Arahan kebijakan dalam pengendalian mobilitas penduduk juga harus memperhatikan pergerakan penduduk baik migrasi maupun urbanisasi. Kondisi yang diinginkan pada aspek mobilitas penduduk adalah terjadinya persebaran penduduk yang merata antar wilayah dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi wilayahnya. Penataan dari persebaran penduduk perlu dilakukan secara proporsional sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Roadmap penataan mobilitas penduduk yang dirumuskan untuk periode 2025 hingga 2045 di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan misi pembangunan kependudukan yaitu meningkatkan penataan persebaran penduduk yang dinamis menunjukkan langkah-langkah strategis dalam mencapai pemerataan persebaran penduduk.

Pada tahun 2025, penataan persebaran penduduk akan dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan peran pusat perkotaan dan non-pusat perkotaan, sehingga setiap kecamatan dapat berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Selanjutnya, pada tahun 2030, fokus akan beralih kepada penataan persebaran penduduk dalam kota dengan memperhatikan daya dukung sosial, ekonomi, dan wilayah, yang penting untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pada tahun 2035, roadmap ini bertujuan untuk mencapai pengarahannya gerak keruangan penduduk dengan mengadopsi tujuan jangka panjang tata ruang perkotaan, sehingga perencanaan tata ruang dapat dilakukan secara terpadu dan efektif. Pada tahun 2040, peningkatan mobilitas non permanen menjadi prioritas dengan menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di pusat-pusat mobilisasi

tinggi, yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup masyarakat. Pada tahun 2045, tujuan utama adalah tercapainya persebaran penduduk yang merata dengan menyeimbangkan pengendalian migrasi, sehingga setiap wilayah dapat berkembang secara optimal tanpa menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan mobilitas penduduk dapat dikelola dengan baik, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 6.4.
Pokok-Pokok Roadmap Penataan dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
Periode 5 Tahunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045

Adapun program yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan kependudukan khususnya penataan dan pengarah mobilitas penduduk di Kabupaten Karanganyar tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

A. Program Pemerataan Pembangunan Wilayah

1. Kegiatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru
 - Pembangunan kawasan ekonomi terpadu di kecamatan pinggiran
 - Pengembangan sentra industri baru
 - Pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan
 - Pengembangan infrastruktur penunjang
2. Kegiatan Konektivitas Wilayah
 - Pembangunan jaringan transportasi terintegrasi
 - Pengembangan sistem transportasi massal
 - Peningkatan akses jalan antar kecamatan
 - Pengembangan infrastruktur digital
3. Kegiatan Insentif Pembangunan
 - Pemberian insentif investasi di wilayah pengembangan
 - Kemudahan perizinan usaha
 - Program subsidi pembangunan
 - Pengembangan kawasan khusus ekonomi

B. Program Pengendalian Permukiman

1. Kegiatan Penataan Kawasan Padat
 - Peremajaan kawasan kumuh
 - Pembangunan rumah susun
 - Relokasi permukiman tidak layak
 - Pengendalian alih fungsi lahan
2. Kegiatan Pengembangan Permukiman Baru
 - Pembangunan kawasan permukiman terencana
 - Pengembangan kota baru
 - Program rumah terjangkau
 - Pembangunan fasilitas sosial terpadu
3. Kegiatan Pengendalian Pembangunan
 - Pengetatan izin mendirikan bangunan
 - Pengawasan tata ruang
 - Pengendalian kepadatan bangunan
 - Penegakan regulasi tata ruang

C. Program Perbaikan Lingkungan

1. Kegiatan Konservasi Sumber Daya
 - Perlindungan sumber air
 - Penghijauan kota
 - Konservasi lahan kritis
 - Pengembangan ruang terbuka hijau
2. Kegiatan Infrastruktur Lingkungan
 - Pengembangan sistem air bersih
 - Pengelolaan limbah terpadu
 - Sistem drainase berkelanjutan
 - Pengelolaan sampah modern
3. Kegiatan Mitigasi Bencana
 - Pemetaan kawasan rawan bencana
 - Pembangunan infrastruktur mitigasi
 - Sistem peringatan dini
 - Penguatan ketahanan masyarakat

D. Program Penanganan Masalah Sosial

1. Kegiatan Pencegahan Kriminalitas
 - Pengembangan sistem keamanan terpadu
 - Pemberdayaan masyarakat dalam keamanan
 - Program pencegahan berbasis komunitas
 - Pengembangan smart surveillance
2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
 - Program pemberdayaan ekonomi
 - Pengembangan keterampilan
 - Penguatan modal sosial
 - Program ketahanan keluarga
3. Kegiatan Pelayanan Sosial
 - Pengembangan pusat layanan sosial
 - Program bantuan sosial terintegrasi
 - Pendampingan kelompok rentan
 - Rehabilitasi sosial

E. Program Penguatan Tata Kelola

1. Kegiatan Perencanaan Terpadu
 - Penyusunan rencana detail tata ruang
 - Pengembangan sistem informasi spasial
 - Perencanaan berbasis data
 - Koordinasi lintas sektor
2. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian
 - Sistem monitoring pembangunan
 - Pengawasan perizinan
 - Pengendalian pemanfaatan ruang
 - Evaluasi dampak pembangunan

6.5. Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (database) kependudukan nasional dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan, yang dapat didayagunakan untuk kepentingan-kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga akan terwujud pembangunan administrasi kependudukan yang berkelanjutan.

Roadmap Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan Kabupaten Karanganyar yang direncanakan untuk periode 2025 hingga 2045 menunjukkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan sistem administrasi kependudukan dan mendukung kebijakan berbasis bukti. Pada tahun 2025, fokus utama adalah pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang efisien dan terintegrasi dalam pengelolaan data kependudukan. Hal ini akan menjadi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Memasuki tahun 2030, tujuan selanjutnya adalah terwujudnya pelayanan terpadu kependudukan yang semakin baik, di mana masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat. Pada tahun 2035, pengembangan informasi dan data kependudukan terpadu akan dilakukan

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK)

Kabupaten Karanganyar ◀◀◀◀

kualitas dan ketahanan keluarga pada umumnya. Keterlibatan segenap pemangku kepentingan pembangunan terutama kalangan dunia usaha, perguruan tinggi/akademisi, organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat serta media massa yang peduli pembangunan kependudukan di Kabupaten Karanganyar sangat penting dan strategis.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

